

Strategi Pencapaian **Swasembada** **Pangan** *Nasional*

Andi Amran Sulaiman

Zainul Azmi

Akbar Choer

PERTANIAN PRESS

2025

STRATEGI PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN NASIONAL

© Andi Amran Sulaiman, Zainul Azmi, Akbar Choer

Penulis: Andi Amran Sulaiman | Zainul Azmi | Akbar Choer

Penelaah substansi: Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. |
Hari Edi Soekirno, S.E., M.A.

Editor: Eni Kustanti | Isvina Unaizahroya | Epik Finilih

Desain kover: Rifki Oktiar Rachman

Tata letak: Dimas Rifqi Altranu | Hidayat Raharja

Editor Pruf: Vivit Wardah Rufaidah

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Judul dan	Strategi pencapaian swasembada pangan nasional / Andi Amran
Penanggung Jawab	: Sulaiman, Zainul Azmi, Akbar Choer; editor, Eni Kustanti, Isvina Unaizahroya
Publikasi	: Bogor: Pertanian Press, 2025
Deskripsi Fisik	: 142 halaman : ilustrasi ; 21 cm
Identifikasi	: ISBN 978-979-582-384-1 : E-ISBN 978-979-582-385-8 (PDF)
Subjek	: Pangan
Klasifikasi	: 338.476 64 [23]
Perpusnas ID	: https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1242488

Sumber gambar kover : Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian
unsplash/sunyoto
unsplash/mufid majnun
unsplash/mehdi sepehri

Penerbit:

Pertanian Press, Anggota Ikapi

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan

Alamat Redaksi

Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
Jl. H. Juanda No.20, Bogor 16122
Website: epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress

Diterbitkan pertama pada 2025 oleh Pertanian Press

Tersedia untuk diunduh secara gratis:

epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

PRAKATA

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa, khususnya melalui sektor pertanian, yang merupakan pilar utama bagi terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan nasional.

Merupakan suatu kehormatan bagi saya, selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia, untuk mempersembahkan buku ini: “Strategi Pencapaian Swasembada Pangan Nasional”, kepada seluruh masyarakat Indonesia, terlebih khusus kepada insan pertanian—para petani, penyuluh, peneliti, akademisi, aparatur pemerintah, dan segenap pemangku kepentingan yang terus bekerja dan berjuang dalam senyap demi tegaknya ketahanan pangan bangsa.

Buku ini tidak hanya menjadi catatan teknokratis tentang program dan capaian, tetapi juga merupakan refleksi kolektif atas perjalanan panjang pembangunan pertanian Indonesia yang kini memasuki fase krusial. Ketika tantangan global semakin kompleks—mulai dari volatilitas harga pangan dunia, perubahan iklim yang ekstrem, hingga disrupsi teknologi dan ketegangan geopolitik—maka pembangunan sektor pertanian tidak bisa lagi dilaksanakan secara biasa-biasa saja.

Di dalam buku ini, kami menguraikan secara sistematis strategi yang telah dan sedang dijalankan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Bab demi

bab dirancang untuk memberikan gambaran yang utuh: mulai dari pendekatan ekstensifikasi melalui pembukaan lahan dan optimalisasi lahan rawa; strategi intensifikasi dengan penguatan irigasi, mekanisasi, benih unggul, dan pupuk; hingga peningkatan produktivitas dan daya saing, serta penguatan ekosistem kawasan pertanian modern yang didukung teknologi dan kelembagaan petani yang tangguh.

Kita meyakini bahwa swasembada pangan bukanlah sekadar capaian angka produksi. Swasembada pangan adalah simbol kemandirian, harga diri, dan ketahanan nasional yang menyentuh dimensi ekonomi, sosial, politik, dan bahkan kultural. Upaya pencapaian swasembada pangan juga bukan proyek jangka pendek yang selesai dalam satu masa pemerintahan, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan keberlanjutan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, serta gotong royong seluruh elemen bangsa.

Dalam menjalankan strategi besar ini, Kementerian Pertanian tidak bekerja sendiri. Kami menyadari pentingnya kolaborasi lintas sektor, keterlibatan pemerintah daerah, sinergi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi, serta partisipasi aktif dari generasi muda dan komunitas lokal. Pembangunan pertanian harus bersifat inklusif dan berkeadilan, serta mampu menjawab kebutuhan nyata petani sebagai pelaku utama di lapangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program yang dijalankan kami pastikan berbasis data dan bukti empiris, berpijak pada kearifan lokal, dan diperkuat oleh inovasi teknologi yang aplikatif.

Melalui buku ini, kami ingin menegaskan bahwa Indonesia mampu swasembada. Kita telah membuktikannya di masa lalu, dan kita

sedang membangunnya kembali dengan pijakan yang lebih kokoh dan sistem yang lebih modern. Keberhasilan panen yang meningkat, penurunan angka impor pada komoditas strategis, serta terbentuknya kawasan-kawasan sentra produksi yang efisien adalah bukti bahwa arah kebijakan kita berada di jalur yang benar.

Namun demikian, pekerjaan besar ini belum selesai, masih ada tantangan yang harus dihadapi dan peluang yang harus kita manfaatkan bersama. Oleh karena itu, kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan strategis, sumber inspirasi, sekaligus undangan terbuka bagi siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap masa depan pangan Indonesia, untuk turut ambil bagian dalam gerakan besar membangun kedaulatan pangan bangsa.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, serta kepada para petani Indonesia yang tidak pernah berhenti menanam harapan bagi negeri ini. Semoga buku ini memberikan manfaat dan dapat menjadi pijakan kuat dalam merumuskan arah kebijakan pertanian ke depan, menuju visi besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar dan langkah kita. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Andi Amran Sulaiman

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 URGENSI DAN ARAH KEBIJAKAN SWASEMBADA PANGAN....	1
BAB 2 VISI MENUJU SWASEMBADA PANGAN	7
A. Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya terhadap Indonesia 9	
B. Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.....	12
C. Swasembada Pangan dalam RPJMN 2025–2029.....	16
BAB 3 STRATEGI PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN	25
A. Perbaikan Regulasi dan Revisi Anggaran	27
B. Ekstensifikasi Pertanian	30
C. Intensifikasi Pertanian	39
D. Modernisasi Pertanian.....	45
1. Penguatan Sumberdaya Manusia Pertanian Muda ...	49
2. Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian serta	
Infrastruktur Dasar	53
3. Pemanfaatan Produk <i>Bioscience</i>	56
4. Hilirisasi Pertanian	58
E. Penguatan Kelembagaan Petani	62
BAB 4 PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN	67
A. Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Eceran Tertinggi	
.....	69
B. Peningkatan Intensitas Pengawasan dan Pendampingan	72
C. Kolaborasi dengan Pihak Terkait	79

D. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Tahun 2025	90
BAB 5 KEBIJAKAN DAN STRATEGI SWASEMBADA BERKELANJUTAN	
.....	95
A. Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Swasembaga Berkelanjutan.....	97
B. Upaya Penguatan Swasembada Keberlanjutan	103
BAB 6 MEMBUMIKAN MIMPI SWASEMBADA, MENYEMAI	
KEDAULATAN PANGAN	109
DAFTAR BACAAN	115
BIOGRAFI PENULIS	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Dampak krisis pangan global	10
Gambar 2.	Krisis pangan global yang menyebabkan harga pangan melonjak menjadi <i>headline news</i> pada beberapa media <i>online</i>	11
Gambar 3.	Indonesia emas dan Asta Cita	13
Gambar 4.	Penulis didampingi oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki serta Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya mengikuti panen jagung di Desa Deunong, Aceh. Kegiatan panen raya jagung di Desa Deunong, Aceh.	22
Gambar 5.	Pertemuan penulis dengan pimpinan TH Group di Kota Hanoi, Vietnam	23
Gambar 6.	Tren anggaran Kementerian Pertanian 2014-2025	29
Gambar 7.	Kunjungan kerja dalam rangka peninjauan Bendung Leter T di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, 24 Januari 2025 untuk mendorong percepatan perbaikan irigasi pertanian	31
Gambar 8.	Kementan percepat swasembada pangan melalui cetak sawah di Kalimantan Tengah	35
Gambar 9.	Penandatanganan kesepakatan strategis mendukung swasembada pangan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Transmigrasi pada Kamis, 9 Januari 2025	36

Gambar 10.	Penulis bersama peneliti di Arkansas saat berkunjung ke AS, September 2024.....	37
Gambar 11.	Tanam padi bersama di Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.....	41
Gambar 12.	Dampak pompanisasi terhadap produksi, IP meningkat dari IP100 menjadi IP200 dan bahkan IP300	45
Gambar 13.	Jumlah dan klasifikasi petani berdasarkan usia	46
Gambar 14.	Penulis melakukan kunjungan Kerja ke Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Jumat, 22 November 2024 untuk meninjau program Oplah, Cetak Sawah, dan Brigade Pangan.....	49
Gambar 15.	Bantuan Alsintan untuk petani milenial yang tergabung dalam Brigade Pangan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan	52
Gambar 16.	Harga rata-rata GKP di tingkat petani per 23 Maret 2025	70
Gambar 17.	Kunjungan kerja Menteri Pertanian bersama Panglima TNI Agus Subiyanto pada acara Serbuan Teritorial, di Pemalang, Jawa Tengah, 19 Desember 2024.	73
Gambar 18.	Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Masyarakat Adat pada kunjungan kerjanya di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 24 November 2024.....	75

Gambar 19.	Penulis memberikan arahan pada Rakor Cetak Sawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, 21 November 2024.....	77
Gambar 20.	Penandatanganan MoU Kementerian Pertanian bersama Kemendiktisaintek dan Forum Diskusi Perguruan Tinggi di Kantor Pusat Kementan, 24 Februari 2025.....	81
Gambar 21.	Penulis mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI membahas Program Cetak Sawah dan kegiatan strategis lainnya, 5 November 2024.....	86
Gambar 22.	Pelantikan Kabinet Merah Putih 2024-2029, 21 Oktober 2024.....	89
Gambar 23.	Pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha (Y-on-Y) (persen), triwulan I-2024, triwulan IV-2024, dan triwulan I-2025	91
Gambar 24.	Pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha (Q-to-Q) (persen), triwulan I-2024, triwulan IV-2024, dan triwulan I-2025	92
Gambar 25.	Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1-2025.....	93
Gambar 26.	Strategi swasembada pangan berkelanjutan.....	96
Gambar 27.	Ringkasan <i>blueprint</i> swasembada pangan.....	98
Gambar 28.	Penulis selaku Menteri Pertanian memimpin rapat di hari kedua puasa, 2 Maret 2025	101

Gambar 29.	Penulis selaku Menteri Pertanian menghadiri Rakor LTT dan Serap Gabah Provinsi Sumatra Selatan, 4 Maret 2025.....	103
Gambar 30.	Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan bersama penulis selaku Menteri Pertanian saat Konferensi Pers Rakortas Bidang Pangan, 28 November 2024.....	105
Gambar 31.	Presiden Prabowo dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, menekankan Ketahanan dan Swasembada Pangan Prioritas Utama Pemerintah, 20 Oktober 2024	107

BAB 1

URGENSI DAN ARAH KEBIJAKAN SWASEMBADA PANGAN

Pangan adalah hak dasar setiap manusia, sekaligus fondasi utama bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan apabila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sejak awal berdirinya Republik Indonesia, isu pangan senantiasa menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam berbagai fase pembangunan, kemandirian pangan selalu ditempatkan sebagai bagian integral dari cita-cita mewujudkan kesejahteraan umum dan menjaga ketahanan nasional.

Buku *Strategi Pencapaian Swasembada Pangan Nasional* ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada publik tentang apa yang telah dan akan dilakukan guna menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Buku ini merekam sekaligus menjelaskan arah kebijakan, strategi, dan langkah-langkah konkret yang telah ditempuh untuk membawa Indonesia kembali mencapai swasembada pangan. Kementerian Pertanian berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat apa yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan dalam upaya membangun kedaulatan pangan. Dengan demikian, buku ini bukan sekadar laporan teknokratis, melainkan juga dokumen strategis yang diharapkan dapat menjadi pijakan bersama dalam merumuskan masa depan pertanian Indonesia.

Di samping itu, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, akademisi, pelaku usaha, maupun organisasi masyarakat sipil, agar memiliki pemahaman yang utuh mengenai arah kebijakan pertanian nasional. Selanjutnya, sebagai dokumen reflektif yang mendokumentasikan perjalanan pembangunan pertanian, buku ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Dengan demikian, buku ini bukan hanya ditujukan bagi kalangan teknokrat, tetapi juga untuk masyarakat luas yang ingin memahami bagaimana negara hadir dalam memastikan kebutuhan pangan rakyat terpenuhi secara berdaulat dan berkelanjutan.

Latar belakang penyusunan buku ini tidak dapat dilepaskan dari situasi yang dihadapi bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 284 juta jiwa pada pertengahan tahun 2025, kebutuhan pangan nasional meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi. Kondisi ini menjadikan pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga instrumen vital yang menentukan keberlanjutan pembangunan, stabilitas sosial, bahkan keamanan nasional. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa swasembada pangan pernah diraih pada dekade 1980-an, namun berbagai faktor struktural seperti degradasi lahan, stagnasi produktivitas, dan tekanan demografis membuat capaian tersebut sulit dipertahankan.

Selain tekanan dari dalam negeri, dinamika eksternal mempertegas urgensi swasembada. Perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir menghadirkan ancaman nyata terhadap produksi pangan. Fenomena El Niño yang berkepanjangan pada 2023

mengakibatkan kekeringan di banyak sentra produksi, memperpendek musim tanam, dan menekan hasil panen. Memasuki 2024 hingga awal 2025, kondisi iklim memang mulai bertransisi menuju netral dan kemudian La Niña lemah, yang memberi peluang curah hujan lebih baik. Namun, variabilitas iklim tetap tinggi sehingga adaptasi dan inovasi teknologi tidak bisa ditunda.

Pada saat yang sama, pasar pangan global memperlihatkan dinamika yang fluktuatif. Lonjakan harga beras internasional pada 2022–2023 akibat pembatasan ekspor sejumlah negara besar memberi pelajaran penting betapa ketergantungan impor membuat sebuah negara sangat rentan. Beruntung, memasuki paruh pertama tahun 2025, harga beras dunia mulai menurun seiring pulihnya pasokan Asia. Kondisi ini membuka ruang bagi stabilisasi harga domestik, meskipun tetap menuntut penguatan produksi dan tata kelola stok di dalam negeri.

Dalam konteks tersebut, data empiris menunjukkan bahwa produksi padi nasional mulai pulih setelah tekanan iklim tahun sebelumnya. Statistik berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai luas panen dan produksi. Pola produksi di awal 2025 menunjukkan perbaikan dibanding awal 2024, dengan puncak panen pada Februari–April yang relatif lebih baik dan potensi panen tambahan pada Agustus–Oktober. Di sisi lain, impor beras yang sempat meningkat tajam pada 2023–2024 untuk menjaga stok pemerintah mulai menurun drastis pada triwulan pertama 2025. Penurunan impor ini menandakan adanya perbaikan pasokan domestik yang cukup signifikan, meskipun diversifikasi pangan

tetap perlu digenjot agar ketergantungan masyarakat pada beras berkurang.

Kerangka kebijakan yang melandasi strategi swasembada pangan juga jelas dan konsisten. UUD 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat konstitusional ini kemudian diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang keduanya menempatkan kemandirian dan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan. Kementerian Pertanian berkomitmen mengoperasionalkan mandat tersebut dengan pendekatan berbasis bukti, memperkuat ekosistem kawasan pertanian, mendorong modernisasi teknologi, serta memastikan bahwa pembangunan pertanian bersifat inklusif dan berkeadilan.

Namun, perjalanan menuju swasembada pangan tentu tidak tanpa hambatan. Risiko iklim masih membayangi meskipun tren cuaca lebih kondusif, produktivitas lahan sub-optimal seperti rawa dan tadah hujan masih rendah, distribusi input pertanian belum merata, dan efisiensi rantai pasok pascapanen masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, peluang akselerasi juga terbuka lebar. Normalisasi harga pangan dunia, ketersediaan teknologi budi daya presisi, peluang perluasan indeks pertanaman melalui rehabilitasi irigasi dan pemanenan air, serta dukungan pembiayaan dan asuransi bagi petani adalah modal penting untuk memperkuat strategi swasembada.

Buku ini hadir untuk mendokumentasikan seluruh strategi tersebut secara sistematis. Penyajian substansi di dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang strategi pencapaian swasembada pangan. Bab demi bab disusun secara sistematis agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dan kerangka strategi yang diusung. Bab pertama menghadirkan visi menuju swasembada pangan, dimulai dengan uraian mengenai krisis pangan global dan bagaimana gejolaknya berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Selanjutnya dibahas Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi arah pembangunan nasional, serta posisi strategis swasembada pangan dalam dokumen RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, bab ini membangun fondasi argumentasi mengapa swasembada pangan bukan sekadar jargon, melainkan keharusan bagi kedaulatan bangsa.

Pada bab kedua dijelaskan mengenai strategi pencapaian swasembada pangan sehingga pembaca akan menemukan berbagai langkah konkret yang dirumuskan, mulai dari perbaikan regulasi dan tata kelola anggaran, ekstensifikasi lahan, intensifikasi produksi, hingga modernisasi pertanian. Bagian modernisasi diperkaya dengan pembahasan mengenai penguatan sumber daya manusia pertanian muda, penyediaan alsintan dan infrastruktur dasar, serta hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Bab ketiga membawa pembahasan lebih jauh dengan fokus pada percepatan pencapaian swasembada pangan. Pada bab ini, buku menyoroti instrumen kebijakan penting seperti harga pembelian pemerintah dan harga eceran tertinggi, strategi peningkatan pengawalan serta pendampingan di lapangan, dan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Bab ini juga dilengkapi dengan gambaran capaian pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pada tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan awal.

Bab ke empat diarahkan untuk memastikan bahwa capaian swasembada tidak berhenti pada pencapaian sesaat, melainkan berlanjut secara konsisten. Karena itu, bab ini membahas kebijakan dan strategi swasembada berkelanjutan, meliputi konsistensi pelaksanaan kebijakan serta berbagai upaya penguatan keberlanjutan, baik dari aspek kelembagaan, teknologi, maupun dukungan sosial-ekonomi. Bab kelima ditutup dengan refleksi sekaligus motivasi: “Membumikan Mimpi Swasembada, Menyemai Kedaulatan Pangan.” Bab ke enam tidak hanya merangkum keseluruhan pembahasan, tetapi juga mengajak pembaca melihat swasembada sebagai cita-cita kolektif bangsa yang harus dijaga, dirawat, dan diperjuangkan.

BAB 2

VISI MENUJU SWASEMBADA PANGAN

Visi menuju swasembada pangan adalah visi bersama bangsa yang telah hidup dalam kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Visi ini lahir dari kesadaran bahwa pangan adalah fondasi utama bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia, sebuah negara agraris dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi sumber daya alam yang melimpah, ketahanan dan kemandirian pangan adalah keniscayaan, bukan pilihan.

Landasan konstitusional yang kuat mempertegas hal ini. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat ini bukan hanya amanat moral, tetapi juga mandat politik dan ekonomi. Negara dituntut untuk memastikan bahwa pangan tersedia, terjangkau, dan berdaulat. Dalam konteks ini, swasembada pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab teknis, melainkan juga menjadi panggilan ideologis bangsa.

Lebih lanjut, arah pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia juga secara konsisten menempatkan kemandirian dan ketahanan pangan sebagai prioritas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, isu kemandirian pangan selalu menempati posisi sentral. Hal ini menandakan bahwa pemerintah, lintas periode dan lintas kepemimpinan, secara konsisten menyepakati swasembada pangan sebagai bagian dari tujuan strategis bangsa menuju Indonesia yang maju dan berdaulat.

Tidak hanya pada tataran kebijakan, visi ini juga hidup dalam praktik nyata lintas sektor. Kementerian Pertanian tentu menjadi ujung tombaknya, namun upaya mencapai swasembada pangan juga melibatkan kementerian/lembaga lainnya yang bersinergi dalam membangun ekosistem pangan nasional. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa swasembada pangan telah menjadi misi nasional yang melibatkan seluruh elemen negara, termasuk masyarakat.

Di sisi masyarakat, dukungan terhadap visi ini pun terlihat nyata. Munculnya berbagai gerakan kedaulatan pangan di tingkat akar rumput, dari desa organik hingga komunitas *urban farming*, menunjukkan bahwa masyarakat sipil pun memahami pentingnya ketahanan pangan dalam negeri. Para petani milenial, akademisi, mahasiswa, dan pelaku usaha agribisnis telah menjadi bagian penting dari gerakan nasional menuju swasembada pangan berkelanjutan. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam perjuangan mewujudkan swasembada.

Dinamika global belakangan ini juga memperkuat urgensi visi menuju swasembada pangan. Pandemi COVID-19, krisis iklim, hingga konflik geopolitik telah menunjukkan bahwa pangan adalah instrumen geostrategis. Ketergantungan pada impor membuat suatu negara rentan terhadap guncangan eksternal. Maka dari itu, swasembada

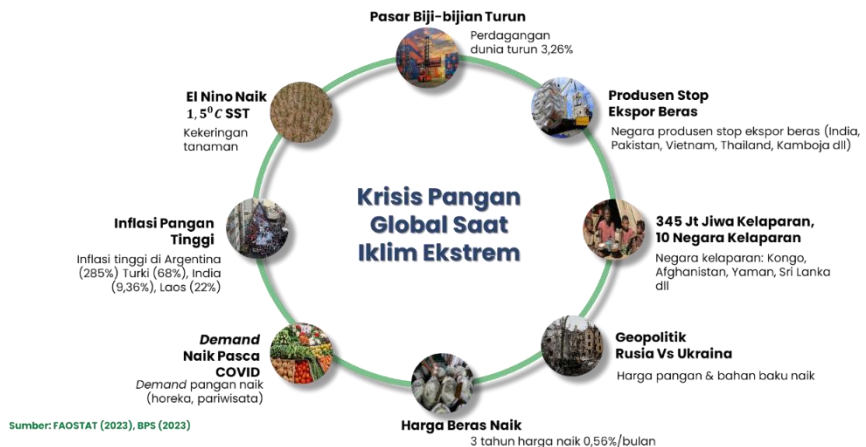
pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, tetapi merupakan bagian dari pertahanan nasional yang hakiki.

Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan strategi dan langkah-langkah nyata menuju pencapaian swasembada pangan nasional. Upaya tersebut mencakup berbagai komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, seperti padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah, daging sapi, susu, daging unggas, tebu, kakao, kopi, dan komoditas penting lainnya. Namun, dalam jangka pendek, fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada dua komoditas pokok, yakni padi (beras) dan jagung, mengingat perannya yang sangat krusial dalam struktur konsumsi rumah tangga Indonesia dan urgensinya dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

A. Krisis Pangan Dunia dan Dampaknya terhadap Indonesia

Dalam dua dekade terakhir, dunia menghadapi krisis pangan yang kian kompleks dan berulang. Bukan hanya disebabkan oleh kelangkaan produksi, krisis ini juga dipicu oleh faktor-faktor sistemik seperti perubahan iklim ekstrem, konflik geopolitik (misalnya perang Rusia–Ukraina), gangguan rantai pasok global, volatilitas harga energi, serta ketergantungan yang berlebihan terhadap impor pangan pokok. Pandemi COVID-19 memperburuk situasi dengan memicu disrupsi sistem distribusi pangan global, sementara fenomena El Niño dan La Niña memperparah ketimpangan produksi antar wilayah.

Strategi Pencapaian Swasembada Pangan Nasional



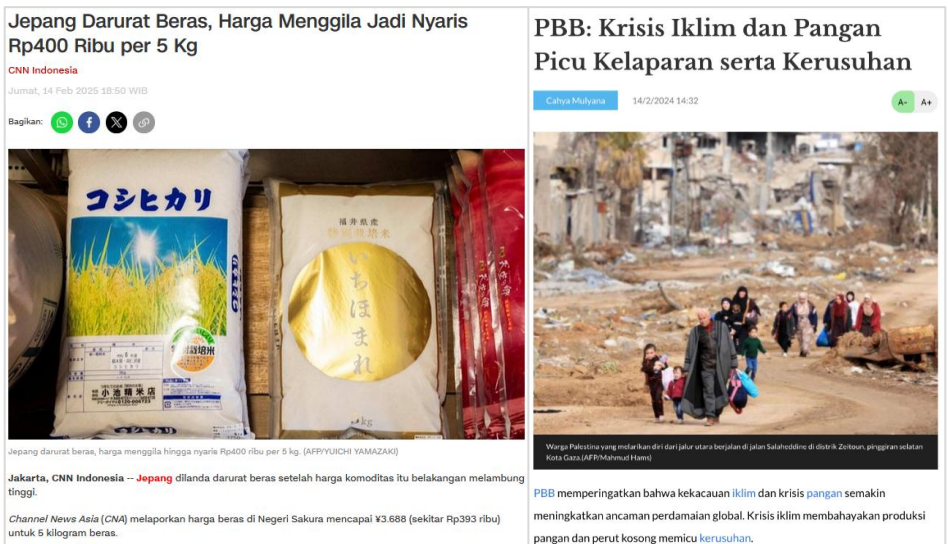
Gambar 1. Dampak krisis pangan global

Sumber: Presentasi Menteri Pertanian pada rapat kerja nasional Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) di Jakarta (2025)

Dampaknya, harga pangan dunia meningkat tajam dan menimbulkan tekanan inflasi di dalam negeri, terutama pada komoditas seperti gandum, minyak goreng, dan kedelai. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi yang paling terdampak, karena lebih dari 50% pendapatan mereka digunakan untuk membeli pangan. Di sisi lain, biaya produksi petani meningkat akibat lonjakan harga pupuk dan energi, yang menyebabkan menurunnya margin keuntungan serta intensitas tanam.

Krisis ini menyadarkan kita bahwa ketahanan pangan bukan semata isu teknis, melainkan persoalan strategis dan geopolitik. Ketergantungan terhadap pasar luar negeri menempatkan Indonesia dalam posisi yang rentan. Namun, krisis ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mereformasi sistem pangannya. Melalui pengurangan

impor beras dan gandum serta mendorong konsumsi pangan lokal seperti sagu, jagung, ubi, dan porang, Indonesia dapat membangun fondasi ketahanan pangan yang lebih kuat. Langkah ini diperkuat dengan upaya peningkatan produktivitas melalui optimalisasi lahan, pencetakan sawah baru, penerapan pertanian presisi, sistem peringatan dini iklim, dan pengembangan varietas unggul tahan iklim ekstrem.



Gambar 2. Krisis pangan global yang menyebabkan harga pangan melonjak menjadi *headline news* pada beberapa media online

Sumber: CNN Indonesia (2025) dan Mulyana (2024)

Krisis pangan dunia merupakan peringatan nyata akan rapuhnya sistem pangan global yang terlalu bergantung pada interkoneksi pasar. Dengan kekayaan sumber daya alam dan

keanekaragaman hayatinya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Namun, kesuksesan strategi ini bergantung pada komitmen politik, tata kelola yang adaptif, serta sinergi lintas sektor dalam perumusan kebijakan. Pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, pada periode 2024–2029 berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen visi-misi Asta Cita.

B. Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menetapkan *Asta Cita* sebagai kerangka pembangunan nasional periode 2024–2029. Dalam delapan agenda besar tersebut, pertanian dan pangan menjadi pilar utama untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan tahan terhadap gejolak global. Krisis pangan global, perubahan iklim, serta ancaman terhadap kedaulatan pangan mendorong pemerintah untuk mengedepankan paradigma baru: kedaulatan pangan (*food sovereignty*). Konsep ini lebih dari sekadar ketahanan pangan. Ia menekankan kemampuan bangsa untuk mengelola, memproduksi, dan mengendalikan sistem pangan secara mandiri dari hulu ke hilir.



Gambar 3. Indonesia emas dan Asta Cita

Sumber: Visi Misi dan Program Prabowo-Gibran (2024)

Pemerintahan Prabowo Subianto menempatkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) sebagai landasan utama dalam merumuskan arah pembangunan pertanian nasional. Berbeda dari pendekatan ketahanan pangan yang lebih menekankan pada ketersediaan dan akses terhadap pangan—termasuk dari impor—konsep kedaulatan pangan menekankan kemampuan bangsa untuk memproduksi dan mengendalikan pangan strategis secara mandiri, dari hulu ke hilir.

Paradigma ini menuntut transformasi struktural dalam sistem pangan nasional, yaitu: pemberdayaan petani, penguatan produksi domestik, dan perlindungan terhadap sumber daya lokal. Diversifikasi pangan menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor gandum, kedelai, dan jagung, dengan menggantinya secara bertahap menggunakan sumber pangan lokal seperti sorgum, sagu, dan ubi kayu.

Salah satu pilar penting dalam agenda kedaulatan pangan ini adalah pengurangan ketergantungan terhadap impor pangan strategis seperti gandum, kedelai, dan jagung. Ketiga komoditas ini selama bertahun-tahun mendominasi kebutuhan pangan dan pakan di Indonesia, namun bergantung pada pasar global yang rentan terhadap fluktuasi harga, iklim, dan geopolitik. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pangan lokal—seperti ubi kayu, jagung dan pangan lokal lainnya—serta intensifikasi produksi dalam negeri menjadi prioritas untuk menggantikan ketergantungan tersebut secara bertahap dan terukur.

Pemerintah juga akan memperkuat ekosistem pertanian nasional yang resilien, tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup penguatan aspek kelembagaan, pembiayaan, teknologi, dan infrastruktur. Upaya ini tercermin dalam pembangunan lumbung pangan terintegrasi (*food estate*) di berbagai wilayah strategis, sebagai pusat produksi skala luas yang didukung dengan mekanisasi, manajemen modern, serta kolaborasi antara petani, BUMN pangan, dan swasta. *Food estate* diarahkan tidak hanya sebagai proyek cetak sawah, tetapi sebagai basis integrasi antara tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan pascapanen.

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya intensifikasi dan modernisasi pertanian melalui pemanfaatan benih unggul, pupuk presisi, alat dan mesin pertanian, serta digitalisasi sistem pertanian. Upaya ini akan dikombinasikan dengan program diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, sehingga konsumsi masyarakat tidak hanya bergantung pada beras, tetapi juga terbuka pada sumber karbohidrat dan protein alternatif.

Dalam mendukung seluruh transformasi tersebut, modernisasi sistem irigasi dan manajemen sumber daya air menjadi krusial. Pemerintah berkomitmen mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan bendungan, embung, dan sistem tata kelola air berbasis teknologi. Hal ini akan menjamin keberlangsungan produksi, khususnya di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.

Namun, keberhasilan modernisasi sangat bergantung pada kesiapan dan kualitas sumber daya manusia yang mengelola dan mengoperasikannya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan kompetensi petani menjadi aspek yang tidak terpisahkan. Penyuluh perlu dibekali dengan pengetahuan terkini tentang teknologi irigasi dan adaptasi perubahan iklim, sementara petani perlu dilatih agar mampu mengadopsi teknologi tersebut secara optimal. Dengan kolaborasi antara infrastruktur modern dan sumber daya manusia yang unggul, maka transformasi sistem pertanian menuju swasembada pangan akan lebih solid dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, penguatan kapasitas petani juga dilakukan melalui pelibatan aktif petani milenial. Kelompok ini memiliki peran strategis dalam menjembatani transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern yang berbasis teknologi. Dengan latar belakang pendidikan yang lebih baik serta keterampilan digital yang mumpuni, petani milenial diharapkan menjadi motor penggerak inovasi di tingkat lapangan. Pemerintah mendorong regenerasi petani melalui berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan agribisnis, inkubasi usaha tani, serta fasilitasi akses terhadap pembiayaan dan pasar. Kehadiran petani milenial tidak hanya memperkuat produktivitas dan efisiensi

usaha tani, tetapi juga membantu mengubah paradigma pertanian menjadi sektor yang menjanjikan secara ekonomi dan membanggakan secara sosial, sehingga makin banyak generasi muda yang tertarik terjun ke dunia pertanian.

C. Swasembada Pangan dalam RPJMN 2025–2029

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025, swasembada pangan termasuk dalam salah satu sasaran program prioritas pembangunan nasional. RPJMN mencetak arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan dengan menekankan pentingnya kemandirian pangan, energi, dan air sebagai fondasi daya saing dan ketahanan nasional.

Dokumen RPJMN menegaskan bahwa upaya pencapaian swasembada nasional mencakup berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah, daging sapi, susu, daging unggas, tebu, kakao, kopi, dan lainnya. Namun, secara jangka pendek, prioritas ditempatkan pada dua komoditas pokok: padi (beras) dan jagung, karena peran vitalnya dalam konsumsi rumah tangga serta sensitif terhadap stabilitas harga pangan.

Dalam rangka mendukung target swasembada pangan secara berkelanjutan, RPJMN juga memuat strategi peningkatan kapasitas petani dan penyuluh melalui pelatihan teknologi pertanian, penguatan kader petani milenial, serta pengembangan kelembagaan agribisnis. Sinergi antarlembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah daerah, akan diimplementasikan melalui Rencana Pangan Nasional (RPN) 2025–2029 untuk memperkuat

ketersediaan, keterjangkauan, mutu, dan keamanan pangan secara terintegrasi dengan RPJMN. Keseluruhan kebijakan ini dirancang agar modernisasi sistem irigasi dan manajemen air dilakukan secara teknologi presisi dan berkelanjutan, sekaligus menghadirkan petani dan penyuluh yang unggul, milenial, dan adaptif. Dengan percepatan proyek pengairan (bendungan dan waduk), peningkatan kapasitas SDM, dan ekosistem pendukung lainnya, RPJMN 2025–2029 meletakkan landasan yang kuat agar impian swasembada pangan nasional menjadi nyata demi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

Meskipun target swasembada pangan yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2025–2029 berada dalam periode waktu yang dimulai pada era pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, namun upaya dan hasil swasembada pangan telah dirasakan sejak periode pemerintahan sebelumnya. Sebagai buktinya, Pemerintah Republik Indonesia pada pertengahan tahun 2024 menerima penghargaan *Agricola Medal* dari *Food and Agriculture Organization* (FAO), tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari FAO di bidang pangan dan pertanian tingkat global, yang telah diberikan sejak tahun 1977.

Salah satu pencapaian gemilang Indonesia dalam satu dekade terakhir sehingga layak mendapatkan penghargaan *Agricola Medal* tersebut adalah keberhasilan meraih swasembada beras sebanyak empat kali, yakni pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021. Upaya untuk kembali mencapai swasembada pangan, khususnya beras, juga telah ditetapkan sebagai target mulai tahun 2025 dan seterusnya. Hingga April 2025, produksi beras menunjukkan peningkatan yang

menggembirakan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Produksi beras Januari–Desember 2018–2024 dan Januari–April 2025
KSA BPS (ton)

No.	Bulan	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*)
1	Januari	1.597.159	1.168.198	934.331	1.200.266	1.416.643	1.340.906	874.266	1.243.332
2	Februari	3.292.203	2.083.208	1.327.945	2.336.620	2.350.250	2.849.262	1.387.718	2.250.903
3	Maret	5.552.374	5.254.902	3.632.380	5.570.088	5.492.153	5.134.806	3.431.331	5.484.809
4	April	4.361.930	5.120.941	5.625.822	4.475.680	4.454.911	3.659.442	5.377.774	4.969.741
5	Mei	2.811.800	2.504.865	3.585.590	2.277.013	2.383.003	2.860.580	3.711.306	
6	Juni	2.576.164	2.474.516	2.059.035	2.326.004	2.510.392	2.786.597	2.096.451	
7	Juli	3.117.487	2.662.700	2.578.403	3.175.452	2.710.682	2.482.905	2.052.440	
8	Agustus	3.082.295	3.214.197	3.344.733	2.401.822	2.350.981	2.523.942	2.950.964	
9	September	2.974.089	2.429.648	3.160.887	2.464.450	2.500.041	2.516.529	3.162.083	
10	Oktober	1.907.535	1.899.125	2.454.950	2.302.018	2.383.083	2.194.502	2.627.790	
11	November	1.606.292	1.522.141	1.858.097	1.652.625	1.876.081	1.615.447	1.797.130	
12	Desember	1.084.019	978.592	934.575	1.173.979	1.112.300	1.136.369	1.151.996	
	Produksi Jan-Apr	14.803.665	13.627.249	11.520.478	13.582.654	13.713.957	12.984.416	11.071.089	13.948.785
	Produksi Jan-Des	33.963.346	31.313.034	31.496.747	31.356.017	31.540.522	31.101.285	30.621.249	13.948.785

Sumber: Rilis Berita Resmi Statistik BPS (3 Maret 2025)

Tak hanya komoditas padi, dalam lima tahun terakhir upaya pemerintah untuk mendorong swasembada jagung menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Data produksi jagung nasional dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan tren pertumbuhan yang dinamis, dengan capaian produksi tahunan yang konsisten berada di atas 12 juta ton, dan puncaknya pada tahun 2022 yang menembus lebih dari 16,5 juta ton.

Tabel 2. Produksi jagung pipilan kering kadar air 14% (JPK-KA14%) Bulan Januari–Desember 2020–2025 (ton)

No.	Bulan	Tahun						Selisih 2024 thd 2023
		2020	2021	2022	2023	2024*)	2025*)	
1	Januari	508.422	1.030.208	1.244.614	1.393.696	512.957	1.176.266	-880.739
2	Februari	528.630	1.270.304	1.731.350	1.425.594	838.314	1.376.445	-587.280
3	Maret	1.548.820	1.283.394	1.503.239	1.198.467	2.051.817		853.350
4	April	1.838.764	863.276	890.849	820.299	1.619.124		798.825
5	Mei	575.912	877.744	1.182.737	1.270.587	1.077.228		-193.359
6	Juni	830.757	1.040.559	1.477.546	1.223.916	1.048.234		-175.682
7	Juli	1.343.943	1.186.252	1.480.628	1.363.394	1.357.547		-5.847
8	Agustus	1.405.359	1.336.642	1.593.490	1.219.499	1.519.989		300.490
9	September	1.403.540	1.177.988	1.493.695	1.508.030	1.666.758		158.728
10	Oktober	1.240.378	1.290.214	1.665.570	1.315.573	1.314.822		-750
11	November	998.982	1.125.220	1.413.351	1.198.194	942.861		-255.334
12	Desember	705.435	933.120	850.203	837.183	1.137.476		300.293
Produksi Jan-Des		12.928.941	13.414.922	16.527.273	14.774.433	15.087.128	2.552.711	312.695

Sumber: KSA BPS (2025)

Pada tahun 2024 produksi jagung menunjukkan tren positif, dengan total produksi mencapai 15,09 juta ton, naik sekitar 312 ribu ton dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya sistem produksi jagung nasional, didorong oleh perbaikan dalam manajemen tanam, penggunaan benih unggul, serta distribusi alat dan mesin pertanian yang lebih baik.

Keberhasilan mencapai peningkatan produksi jagung tidak hanya bergantung pada peningkatan volume produksi, tetapi juga kestabilan harga, efisiensi distribusi, dan nilai tambah di sektor hilir. Peningkatan produksi akan optimal bila dibarengi dengan pembangunan industri pakan lokal, pengolahan jagung skala kecil-menengah, serta penguatan posisi tawar petani dalam rantai pasok. Dengan fondasi ini, jagung berpotensi menjadi komoditas mandiri yang tidak hanya menopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa dan kawasan.

Melihat berbagai capaian positif baik untuk produksi padi maupun jagung di Indonesia, Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu, menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mentransformasi sistem pertanian melalui penerapan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyampaikan terima kasih kepada para petani Indonesia atas kontribusi mereka dalam mendukung pencapaian swasembada pangan. Sebagai upaya mendukung hal tersebut, pemerintah telah menetapkan program prioritas yang berfokus pada percepatan dan peningkatan produksi komoditas strategis nasional. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang selama ini kurang produktif, seperti lahan rawa, lahan tadah hujan, dan lahan tidak tergarap.



Gambar 4. Penulis didampingi oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki serta Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya mengikuti panen jagung di Desa Deunong, Aceh. Kegiatan panen raya jagung di Desa Deunong, Aceh.

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

Tanda-tanda kebangkitan di sektor pertanian nasional juga tercermin dengan kembali dilakukannya ekspor jagung, sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Peningkatan produksi jagung kini tengah didorong melalui sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah daerah. Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah kegiatan panen dan tanam jagung yang dilaksanakan pada 6 Februari 2024 bersama Pangdam Iskandar Muda dan Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, di lahan Demplot Yonif 112/DJ yang terletak di Desa Deunong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.



Gambar 5. Pertemuan penulis dengan pimpinan TH Group di Kota Hanoi, Vietnam
Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

Pencapaian Indonesia dalam bidang pangan tidak hanya berhenti pada swasembada, tetapi telah berkembang menuju kemampuan ekspor berbagai komoditas, termasuk unggas dan telur, ke pasar global. Keberhasilan ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam produksi nasional, di mana sektor unggas dan telur telah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus menghasilkan surplus untuk diekspor ke sejumlah negara. Perkembangan positif ini turut dibahas dalam pertemuan antara perwakilan Indonesia dan pimpinan TH Group, sebuah perusahaan ternama asal Vietnam, yang berlangsung di Hanoi pada 27 Juli 2024. Pertemuan ini dilakukan untuk menjajaki peluang investasi yang akan dilakukan oleh TH Group Vietnam ke sektor pertanian nasional.

"Salah satu fondasi awal dalam strategi ini adalah perbaikan regulasi di sektor pertanian."

BAB 3

STRATEGI PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN

Pencapaian swasembada pangan bukan sekadar target teknokratik, melainkan misi strategis nasional untuk menjamin ketersediaan pangan rakyat Indonesia secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan. Setelah ditetapkannya RPJMN 2025–2029 melalui Perpres 12/2025, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh perangkat regulasi, anggaran, dan operasional pembangunan pertanian benar-benar diarahkan untuk mencapai tujuan besar ini. Oleh karena itu, strategi pencapaian swasembada pangan perlu didesain secara komprehensif, menyentuh aspek kelembagaan, pembiayaan, serta transformasi sistem produksi dan sumber daya manusia.

Salah satu fondasi awal dalam strategi ini adalah perbaikan regulasi di sektor pertanian. Harmonisasi aturan lintas Kementerian/Lembaga, penyederhanaan perizinan, serta penguatan perlindungan petani melalui berbagai insentif menjadi prioritas utama. Pemerintah juga tengah menata ulang kerangka regulasi yang mendukung ketersediaan lahan, pengelolaan air, pengendalian impor, hingga distribusi pupuk dan benih secara tepat sasaran. Regulasi yang kuat akan menjadi jangkar kepastian usaha tani dan mendorong investasi produktif dalam sektor pangan.

Selain itu, strategi *refocusing* anggaran menjadi kunci untuk mengoptimalkan sumber daya fiskal yang terbatas. Anggaran pembangunan pertanian akan lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang secara langsung meningkatkan produktivitas dan

kapasitas produksi pangan nasional. *Refocusing* ini meliputi penguatan anggaran untuk kegiatan penyediaan sarana produksi, pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta insentif bagi petani muda yang berwirausaha di bidang pangan.

Secara substansi, strategi operasional pencapaian swasembada pangan dibangun di atas empat pilar utama: peningkatan produksi, ekstensifikasi pertanian, intensifikasi pertanian, dan modernisasi sistem pertanian. Ekstensifikasi diarahkan pada pembukaan lahan baru, terutama di kawasan potensial seperti rawa dan lahan terlantar, dengan pendekatan berkelanjutan. Intensifikasi mencakup penerapan teknologi budidaya yang efisien, perbaikan irigasi, penggunaan varietas unggul, dan tata kelola input produksi yang lebih presisi.

Modernisasi menjadi elemen strategis yang membedakan pendekatan swasembada masa kini dengan masa lalu. Transformasi pertanian menuju mekanisasi, digitalisasi, dan agroindustri skala kecil di pedesaan menjadi fokus utama. Dalam kerangka ini, pelibatan generasi muda sebagai petani milenial, *startup* agritech, hingga penyuluh berbasis teknologi akan menjadi motor utama perubahan. Pemerintah secara aktif mengembangkan program inkubasi, pelatihan, dan pendampingan untuk mencetak SDM unggul dan adaptif yang mampu mengelola pertanian sebagai usaha profesional dan menguntungkan.

Dengan sinergi antara perbaikan regulasi, penajaman arah anggaran, dan pelaksanaan strategi teknis berbasis empat pilar tersebut, Indonesia menapaki jalan yang lebih realistis dan terstruktur

menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Bab ini akan menguraikan secara rinci kebijakan dan pendekatan strategis yang mendasari transformasi besar ini.

A. Perbaikan Regulasi dan Revisi Anggaran

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan yang diundangkan pada tanggal 30 Januari 2025, hadir sebagai landasan hukum dan arahan strategis bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur irigasi nasional.

Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat infrastruktur irigasi guna mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Dalam konteks agroekosistem Indonesia yang sangat bergantung pada ketersediaan air, modernisasi sistem irigasi bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, melainkan juga fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan.

Implementasi Inpres ini diharapkan mampu mengoptimalkan distribusi air pada lahan pertanian, mengurangi ketergantungan pada cuaca, serta meningkatkan intensitas tanam. Dengan irigasi yang dikelola secara presisi, petani dapat memanfaatkan lahan secara lebih efisien, bahkan di musim kemarau. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan produksi beras, jagung, dan komoditas strategis lainnya yang menjadi penopang ketahanan pangan nasional.

Kebijakan irigasi yang tertuang dalam Inpres No. 2/2025 tidak hanya bersifat fisik-infrastruktural, tetapi juga mengandung dimensi

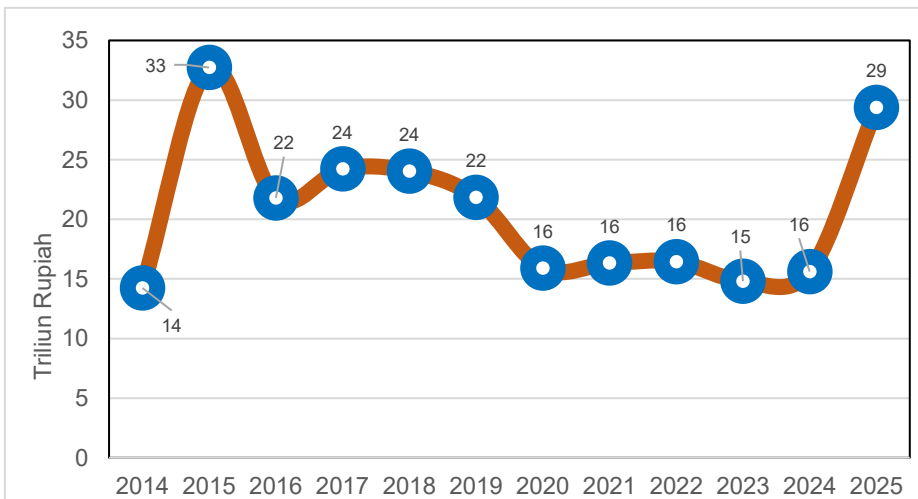
sosial-ekonomi. Pembangunan jaringan irigasi yang merata dan berkelanjutan dapat meminimalisasi kesenjangan akses antardaerah, mendorong pemerataan hasil pertanian, dan pada akhirnya memperkuat kemandirian pangan. Langkah ini menjadi katalisator dalam mengurangi impor bahan pokok sekaligus menstabilkan harga di tingkat konsumen.

Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat petani. Penyediaan teknologi irigasi hemat air, pelatihan sumber daya manusia, serta pendampingan teknis menjadi komponen kunci untuk memastikan bahwa pembangunan irigasi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga adaptif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan masa depan. Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang Irigasi Pertanian merupakan langkah progresif yang memadukan aspek teknis, ekologis, dan sosial. Jika diimplementasikan secara konsisten, kebijakan ini tidak hanya akan mengamankan pasokan pangan nasional, tetapi juga menguatkan posisi Indonesia sebagai negara agraris yang berdaulat di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Selain adanya regulasi yang menyinergikan langkah antar Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan swasembada pangan, di tingkat internal Kementerian Pertanian pun perlu dilakukan berbagai langkah strategis untuk mengatur ulang program dan kegiatan. Salah satu hal penting yang telah dilakukan sejak akhir tahun 2023 hingga 2024 adalah melakukan revisi dalam rangka *refocusing* anggaran.

Revisi anggaran dalam rangka *refocusing* diperlukan untuk mengakomodasi belanja modal dan belanja operasional yang

mendukung integrasi program irigasi dengan program penyediaan sarana produksi, pendampingan petani, serta adopsi teknologi hemat air. Sinkronisasi antara prioritas anggaran pertanian dan kebijakan irigasi menjadi titik krusial dalam menjamin capaian target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, revisi anggaran bukan sekadar penyesuaian teknokratis, melainkan bagian dari reposisi strategis kementerian dalam menjawab mandat pembangunan nasional yang ditekankan dalam Inpres tersebut.



Gambar 6. Tren anggaran Kementerian Pertanian 2014-2025

Sumber: Kementerian Keuangan (2025)

Dengan dilakukannya *refocusing* anggaran di tahun 2023–2024 tersebut, sektor pertanian khususnya untuk komoditas padi mencatatkan hasil yang menggembirakan dimana produksi pada akhir 2024–awal 2025 menembus angka tertinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

B. Ekstensifikasi Pertanian

Lonjakan jumlah penduduk, kondisi iklim yang semakin ekstrem, serta menurunnya kualitas lahan pertanian yang sebelumnya produktif kini menjadi tantangan nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Mengandalkan intensifikasi saja—yakni peningkatan hasil di lahan yang ada—tidak lagi cukup.

Oleh karena itu, pemerintah mulai mengembangkan pendekatan ekstensifikasi pertanian, misalnya dengan membuka lahan sawah baru dan memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini kurang optimal seperti rawa, ladang tadah hujan, dan lahan tidur.

Namun, perluasan ini bukan sekadar soal membuka lahan baru, melainkan juga soal mendistribusikan teknologi dan sumber daya secara merata ke wilayah yang punya potensi besar. Hal yang tak kalah penting, pendekatan ini harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian agar tidak merusak ekosistem, tetap memperhatikan kondisi sosial, dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.



Gambar 7. Kunjungan kerja dalam rangka peninjauan Bendung Leter T di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, 24 Januari 2025 untuk mendorong percepatan perbaikan irigasi pertanian

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2025)

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah yang turut menjalankan upaya peningkatan produksi padi dan jagung melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Program ini mencerminkan komitmen daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dengan memaksimalkan potensi lahan serta meningkatkan efisiensi budidaya. Dengan target luas tanam padi 188 ribu hektare pada 2025 dan potensi mencapai dua juta ton beras, NTT diarahkan menjadi lumbung pangan timur Indonesia. Surplus beras hingga 700 ribu ton sangat mungkin dicapai jika potensi ini dimaksimalkan secara intensif.

Melihat potensi yang dimiliki, produksi padi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejatinya dapat ditingkatkan secara signifikan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam provinsi, tetapi juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Lahan tanam yang tersedia diperkirakan mencapai 200 ribu hektare, yang memungkinkan untuk ditanami dua kali dalam setahun.

Jika dimanfaatkan secara optimal, produksi beras bisa mencapai sekitar dua juta ton per tahun. Mengingat kebutuhan konsumsi beras di NTT hanya sekitar 1,3 juta ton, maka daerah ini berpeluang menciptakan surplus hingga 700 ribu ton yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

Pengalaman Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi bukti nyata bahwa pencapaian swasembada pangan tidak semata bergantung pada tradisi pertanian yang telah mapan atau lokasi geografis yang dianggap unggul, tetapi lebih pada keberanian untuk memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal dan terukur. Selama ini, NTT bukanlah wilayah yang secara historis dikategorikan sebagai sentra produksi pangan nasional.

Namun, dengan kebijakan intervensi yang tepat, wilayah ini berhasil menunjukkan geliat pertumbuhan produksi yang signifikan, khususnya dalam komoditas padi dan jagung. Berdasarkan data dan pengamatan di lapangan, lahan tanam yang tersedia di NTT diperkirakan mencapai 200 ribu hektare. Sebagian besar dari lahan tersebut memungkinkan untuk ditanami dua kali dalam satu tahun. Dengan sistem tanam dua kali ini, potensi produksi beras di NTT dapat mencapai sekitar dua juta ton per tahun.

Jika angka ini direalisasikan secara konsisten, maka Provinsi NTT berpeluang menciptakan surplus produksi hingga 700 ribu ton beras per tahun, mengingat kebutuhan konsumsi masyarakat NTT hanya sekitar 1,3 juta ton. Surplus ini bukan hanya menjadi cadangan strategis provinsi, tetapi dapat dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara lebih luas. Dengan kata lain, NTT dapat bertransformasi dari wilayah konsumen menjadi kontributor aktif dalam sistem pangan nasional.

Prestasi dan potensi ini seharusnya menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki agroekosistem serupa atau bahkan lebih unggul. Jika wilayah seperti NTT dengan berbagai tantangan iklim, infrastruktur, dan topografi mampu menunjukkan capaian yang menjanjikan, maka wilayah-wilayah lain yang memiliki prasyarat lahan, air, dan dukungan teknologi yang lebih memadai semestinya juga dapat mendorong perluasan areal tanam secara masif.

Strategi pencapaian swasembada pangan tidak dapat mengandalkan pendekatan yang bersifat normatif semata. Diperlukan keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan membuka potensi baru yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Keberhasilan NTT menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui perbaikan regulasi, *refocusing* anggaran, penyediaan sarana produksi, serta mobilisasi sumber daya manusia dapat menghasilkan dampak nyata.

Oleh karena itu, pengembangan kawasan sentra produksi baru harus menjadi bagian dari kerangka besar strategi ekstensifikasi nasional seperti halnya yang dilakukan juga di provinsi lain, yaitu di Kalimantan Tengah.

Sebagai upaya mempercepat tercapainya swasembada pangan nasional, pemerintah terus mendorong berbagai terobosan, salah satunya melalui Program Cetak Sawah dan Optimasi Lahan (Oplah). Di Kalimantan Tengah, program ini diwujudkan secara nyata oleh Brigade Pangan sebagai bagian dari strategi penguatan produksi nasional. Inisiatif cetak sawah dan oplah tidak sekadar perluasan lahan, tetapi merupakan langkah terencana untuk mengoptimalkan potensi lahan yang tersedia.

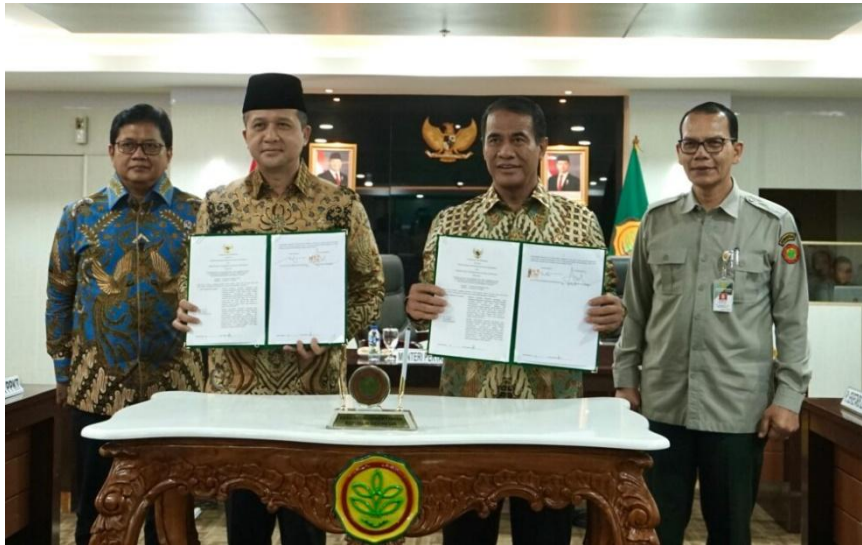
Dengan keterlibatan aktif Brigade Pangan dalam persiapan lapangan, muncul optimisme bahwa target swasembada dapat dicapai lebih cepat. Untuk mendukung keberhasilan program ini, Kementerian Pertanian juga menyalurkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian. (alsintan), benih unggul, dolomit, serta pupuk bagi para petani yang terlibat.



Gambar 8. Kementan percepat swasembada pangan melalui cetak sawah di Kalimantan Tengah

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

Selain melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, upaya percepatan pencapaian swasembada pangan juga memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan sinergi antara berbagai pihak. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian mengambil peran aktif dengan menyiapkan berbagai elemen pendukung, seperti lahan klaster pertanian modern, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, pupuk, serta program pendampingan dan pelatihan peningkatan kapasitas petani.



Gambar 9. Penandatanganan kesepakatan strategis mendukung swasembada pangan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Transmigrasi pada Kamis, 9 Januari 2025

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2025)

Sebagai bagian dari strategi integratif, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Transmigrasi menjalin kerja sama dalam pembangunan dan pemberdayaan kawasan transmigrasi. Kerja sama ini dituangkan dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani pada Kamis, 9 Januari 2025 di Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

Gagasan utama kerja sama adalah membentuk klaster pertanian sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di perdesaan, dengan transformasi dari sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern. Melalui model ini, kawasan transmigrasi diharapkan

berkembang menjadi sentra pertanian modern, sehingga keterampilan dan kesejahteraan petani, khususnya para transmigran, dapat meningkat secara berkelanjutan.



Gambar 10. Penulis bersama peneliti di Arkansas saat berkunjung ke AS, September 2024

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

Swasembada pangan melalui Program Cetak Sawah merupakan program yang sangat penting untuk diimplementasikan. Program ini juga mendapatkan tanggapan positif dari dunia akademisi internasional karena dapat menjaga ketahanan pangan dalam menghadapi kondisi darurat seperti El Niño. Para akademisi dari *Rice Research & Extension Center, University of Arkansas* menilai bahwa upaya Indonesia dalam membuka lahan sawah secara masif merupakan langkah yang masuk akal dan berdasar, terutama jika dilihat

dari kebutuhan mendesak akan peningkatan produksi pangan dan pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang belum optimal. Hal itu diungkapkan saat delegasi Indonesia mengunjungi pusat penelitian padi di Arkansas yang dilakukan pada bulan September 2024. Arkansas, dikenal sebagai pusat produksi padi terbesar di Amerika Serikat, menyambut baik diskusi ini. Dengan setengah dari total 2,5 juta hektare lahan sawah di negara tersebut berada di Arkansas, negara bagian ini menjadi lokasi strategis bagi pengembangan teknologi pertanian padi. Diskusi antara para peneliti Arkansas dan delegasi Indonesia berfokus pada penerapan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan di Indonesia.

Berbagai upaya mempercepat peningkatan produksi dan mengembalikan swasembada pangan kerap dilakukan Kementerian Pertanian melalui kolaborasi antar kementerian/lembaga lain termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kementerian Pertanian bersama TNI menyepakati kerja sama strategis dalam mendukung pembangunan pertanian nasional melalui sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani pada Senin, 4 Desember 2023. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas produksi pangan nasional, sekaligus mengembalikan capaian swasembada yang pernah diraih beberapa tahun sebelumnya.

Salah satu langkah konkret dari kerja sama dengan TNI adalah pemanfaatan lahan-lahan tidur dan optimalisasi potensi lahan rawa mineral hingga 10 juta hektare, sebagai bagian dari strategi menghadapi tantangan krisis pangan akibat dampak El Niño yang semakin nyata. Lahan sebesar 10 juta hektare lahan berupa rawa yang bisa diupayakan menjadi lahan produktif. Kalau bisa bertambah

melampaui sejumlah itu, tak bisa dipungkiri Indonesia bahkan bisa menjadi lumbung pangan dunia. Pemanfaatan 10 Juta hektare ini membutuhkan penggunaan secara masif seperti traktor, *drone* untuk menebar benih, *transplanter*, dan alsintan lainnya yang harus digunakan untuk meningkatkan produktivitas.

Berbagai dukungan secara politik terkait upaya pencapaian swasembada pangan pun terus mengalir. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), mengapresiasi berbagai gebrakan Kementerian Pertanian yang terus berupaya mewujudkan swasembada beras baik melalui Program Oplah maupun program Cetak Sawah yang saat ini tersebar di sejumlah provinsi, serta kerja sama intensif dengan berbagai Kementerian/Lembaga yang ada. Optimisme capaian swasembada, melalui percepatan pertanaman, oplah maupun cetak sawah dapat segera terwujud dalam waktu dekat salah satunya dapat terlihat karena adanya dukungan dari DPR dan semua pihak.

C. Intensifikasi Pertanian

Ketahanan pangan Indonesia dihadapkan pada dua tantangan utama: terbatasnya lahan pertanian akibat alih fungsi dan terus meningkatnya permintaan pangan nasional. Dalam kondisi ini, intensifikasi pertanian menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas tanpa memperluas lahan. Intensifikasi merupakan pendekatan peningkatan hasil produksi melalui pemanfaatan input produksi secara lebih efisien, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan. Sebagai negara agraris tropis dengan tantangan iklim dan kondisi agroekologi yang beragam, pendekatan intensifikasi di Indonesia harus disesuaikan dengan

karakter lokal serta didukung kebijakan yang holistik. Empat elemen utama intensifikasi yang menjadi fokus nasional saat ini adalah: penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pompanisasi, dan perbaikan sistem irigasi/bendungan.

Kementerian Pertanian terus mendorong terwujudnya swasembada pangan sebagai langkah menuju cita-cita besar: menjadikan Indonesia sebagai pusat pangan dunia. Salah satu upaya strategis yang kini tengah difokuskan adalah program intensifikasi pertanian untuk meningkatkan intensitas pertanaman. Kunci utama peningkatan intensitas pertanaman tersebut adalah ketersediaan air yang memadai. Oleh karena itu, sejak akhir tahun 2023 Kementerian Pertanian *me-refocusing* sebagian anggaran untuk dialihkan ke pengadaan pompa air guna mengalirkan air dari sungai ke sawah saat musim kemarau, dan mengeluarkan air yang berlebih saat musim hujan ekstrem terjadi.

Di tengah terjadinya El Niño (kekeringan ekstrem), kegiatan pompanisasi dirancang sebagai solusi tanggap terhadap ancaman kekeringan berkepanjangan akibat gelombang panas global. Agar manfaatnya optimal, distribusi pompanisasi harus merata di berbagai wilayah pertanian, dengan harapan mampu meningkatkan frekuensi tanam dari hanya sekali menjadi tiga kali dalam setahun. Dengan demikian, bisa pastikan Indonesia mampu mencapai swasembada hingga lumbung pangan dunia.

Dalam menghadapi dampak perubahan iklim global yang berpotensi menurunkan hasil produksi pertanian, berbagai langkah mitigasi terus diupayakan pemerintah. Salah satu pendekatan cepat

yang diambil adalah pengembangan sistem pompanisasi untuk mempercepat peningkatan produktivitas lahan. Di samping itu, dicanangkan pula program pembukaan lahan sawah baru seluas 3 juta hektare guna memperluas kapasitas produksi nasional. Upaya intensifikasi turut diperkuat melalui penyediaan pupuk yang mencukupi dan seimbang bagi petani. Pemerintah telah berhasil memperjuangkan tambahan alokasi pupuk agar kebutuhan di lapangan dapat terpenuhi hingga 100 persen. Untuk mendukung hal tersebut, anggaran subsidi pupuk pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp28 triliun, mencakup volume pupuk sebanyak 9,55 juta ton—lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelumnya yang hanya sekitar 4,7 juta ton.



Gambar 11. Tanam padi bersama di Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

Sebagai salah satu percontohan nyata dalam strategi pencapaian swasembada pangan, Kementerian Pertanian mendorong Pulau Madura—khususnya empat kabupaten, yakni Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang—untuk menjadi model transformasi pertanian berbasis potensi lokal. Pulau Madura, yang selama ini lebih dikenal sebagai kawasan dengan tantangan iklim dan keterbatasan infrastruktur pertanian, justru kini diproyeksikan sebagai tumpuan baru dalam peningkatan produksi pangan nasional. Melalui pendekatan yang berbasis pada penguatan infrastruktur dan efisiensi tata kelola air, daerah ini diarahkan untuk mampu mengulangi kesuksesan Indonesia pada masa lalu dalam meraih swasembada pangan, terutama pada komoditas strategis seperti padi dan jagung.

Upaya yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh, dengan menitikberatkan pada optimalisasi sumber daya alam yang tersedia. Salah satu strategi utama adalah penguatan sistem irigasi dan perpompaan (irpom), terutama pada daerah-daerah yang selama ini hanya mengandalkan tadah hujan. Penerapan teknologi pompanisasi pada sungai-sungai dengan debit air yang relatif stabil sepanjang tahun menjadi solusi konkret untuk menjamin ketersediaan air irigasi secara berkelanjutan, bahkan di musim kemarau. Sistem ini tidak hanya membantu perluasan areal tanam, tetapi juga memungkinkan intensifikasi pertanaman dengan sistem tanam dua hingga tiga kali dalam setahun.

Kementerian Pertanian yakin bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada pangan. Keyakinan ini didukung oleh peningkatan bantuan pupuk yang mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan

produksi pertanian. Selain itu, ketersediaan lahan yang luas juga menjadi faktor pendukung penting. Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan sekaligus mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai lumbung pangan global adalah dengan mengoptimalkan lahan rawa mineral menjadi area pertanian yang produktif.

Saat ini, Indonesia memiliki potensi lahan rawa mineral seluas 10 juta hektare yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya. Pemanfaatan lahan ini dinilai strategis untuk meningkatkan produksi pertanian nasional.

Indonesia perlu segera mengambil langkah strategis dengan membangun fondasi yang kokoh, termasuk penyediaan benih berkualitas, pupuk, serta dukungan percepatan adopsi teknologi mekanisasi pertanian. Prestasi Indonesia dalam mencapai swasembada pangan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya. Terlebih, saat ini sebagian besar wilayah telah memasuki musim hujan, menandakan bahwa dampak buruk El Niño telah berakhir. Langkah berikutnya adalah memastikan petani memiliki akses yang memadai untuk menikmati keuntungan dari hasil panen mereka. Salah satu caranya adalah melalui distribusi bantuan benih dan penyediaan pupuk merata di semua daerah, sehingga harga hasil pertanian tetap stabil dan wajar.

Dengan berbagai upaya pemerintah dalam perluasan areal tanam (PAT) dan menerapkan solusi cepat pompanisasi untuk mengantisipasi kekeringan akibat gelombang panas, diproyeksikan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu kurang

dari tiga tahun. Langkah ini semakin diperkuat dengan peningkatan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, distribusi benih gratis, pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan), serta penerapan pompanisasi sebagai bagian dari strategi mitigasi dampak kekeringan jangka panjang.

Distribusi pompa air telah berhasil mengairi lahan seluas 500 ribu hektare. Dengan asumsi produktivitas rata-rata 5 ton per hektare, potensi hasil panen yang diperkirakan mencapai 2,5 hingga 5 juta ton. Di samping itu, pompanisasi dilakukan untuk mendorong adanya peningkatan indeks pertanaman dari yang tadinya hanya menanam 1 kali setiap tahunnya (IP100), menjadi 2 kali (IP200) atau bahkan 3 kali tanam dalam setahun (IP300).

Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak produksi secara signifikan, sehingga prediksi BPS dan Bapanas mengenai surplus beras di Indonesia dapat tercapai. Gebrakan pompanisasi yang diimplementasikan secara masif merupakan salah satu terobosan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dengan *me-refocusing* anggaran yang ada dari kegiatan-kegiatan non-produktif menjadi kegiatan produktif, termasuk pompanisasi, diharapkan produksi akan meningkat secara signifikan pada saat terjadi El Niño (kekeringan ekstrem) atau bahkan La Niña (musim hujan ekstrem).



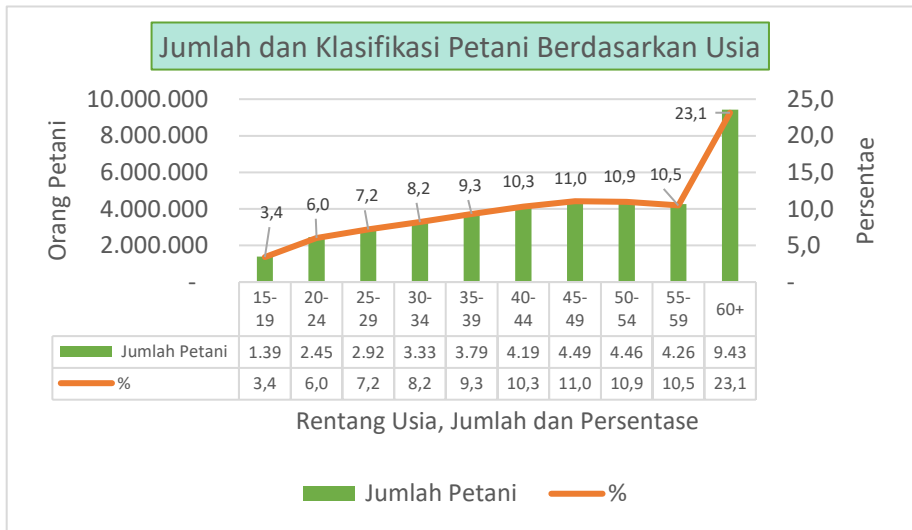
Gambar 12. Dampak pompanisasi terhadap produksi, IP meningkat dari IP100 menjadi IP200 dan bahkan IP300

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

D. Modernisasi Pertanian

Pertanian Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural yang cukup serius, terutama terkait krisis regenerasi petani dan stagnasi produktivitas. Mayoritas petani berada pada rentang usia di atas 60 tahun (23,1%) dan lebih dari setengahnya berada di atas usia 50 tahun (55,5%) sebagaimana disajikan pada Gambar 13. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian semakin kehilangan daya tariknya di mata generasi muda. Padahal, keberlanjutan sistem pangan nasional sangat bergantung pada hadirnya pelaku utama yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Minimnya regenerasi ini juga berdampak pada lambatnya adopsi teknologi dan metode pertanian baru, sehingga

menjadikan produktivitas lahan cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 13. Jumlah dan klasifikasi petani berdasarkan usia

Sumber: Sakernas BPS (2025)

Di tengah tantangan tersebut, modernisasi pertanian menjadi pilihan strategis dan tak terelakkan. Namun, modernisasi bukan hanya tentang mengganti cangkul dengan traktor. Lebih dari itu, modernisasi pertanian harus dipahami sebagai transformasi menyeluruh, mencakup perubahan cara pandang, pengelolaan usaha tani, serta model produksi dan pemasaran. Modernisasi menuntut sistem pertanian yang efisien, berbasis data, menggunakan teknologi digital, dan mampu menarik minat generasi muda untuk kembali menekuni sektor ini secara profesional.

Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama dalam agenda modernisasi ini. Kementerian Pertanian telah menginisiasi berbagai program untuk melibatkan petani milenial dan Gen Z melalui pelatihan, inkubasi bisnis, hingga dukungan akses terhadap pembiayaan dan teknologi. Diharapkan, generasi muda yang terlibat dalam sektor pertanian dapat menjadi agen perubahan yang membawa semangat kewirausahaan, serta mempercepat adopsi inovasi di tingkat lapangan.

Selain penguatan SDM, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan usaha tani, dan embung juga menjadi prioritas dalam mendorong efisiensi produksi. Mekanisasi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual yang semakin langka dan mahal, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan. Di berbagai daerah, penggunaan alsintan terbukti mampu mempercepat proses olah tanah, tanam, panen, dan pascapanen, sehingga menekan biaya dan waktu produksi secara drastis.

Tak kalah penting, arah modernisasi pertanian juga mencakup penguatan hilirisasi. Dengan mendorong petani dan kelompok tani untuk terlibat dalam pengolahan hasil, pengemasan, hingga pemasaran produk berbasis digital, nilai tambah produk pertanian dapat ditingkatkan secara signifikan. Hilirisasi bukan hanya menciptakan diversifikasi produk, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi generasi muda, serta memperluas akses pasar domestik dan ekspor. Oleh karena itu, modernisasi yang dilakukan secara simultan pada aspek hulu, *on-farm*, dan hilir akan menjadi kunci dalam

menjadikan pertanian Indonesia tidak hanya tangguh, tetapi juga kompetitif di pasar global.

Pertanian Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural yang krusial yaitu krisis regenerasi petani dan stagnasi produktivitas. Data menunjukkan bahwa rata-rata usia petani Indonesia telah mencapai lebih dari 50 tahun, sedangkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian relatif rendah. Di sisi lain, transformasi teknologi digital dan mekanisasi global menuntut sistem pertanian Indonesia untuk bergerak lebih cepat ke arah pertanian modern.

Modernisasi pertanian tidak sekadar adopsi alat dan mesin, melainkan perubahan paradigma—dari pertanian berbasis tenaga kerja konvensional menuju sistem produksi yang efisien, berteknologi, dan menarik bagi generasi muda. Dalam konteks ini, dua komponen strategis modernisasi pertanian melibatkan petani milenial dan Gen Z serta mekanisasi pertanian.



Gambar 14. Penulis melakukan kunjungan kerja ke Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Jumat, 22 November 2024 untuk meninjau program Oplah, Cetak Sawah, dan Brigade Pangan

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

1. Penguatan Sumberdaya Manusia Pertanian Muda

Transformasi sektor pertanian Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penguatan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Dalam dua dekade terakhir, sektor ini menghadapi tantangan serius dalam hal regenerasi petani. Rata-rata usia petani Indonesia saat ini telah menembus angka 50 tahun ke atas, dengan kecenderungan menurun dalam jumlah tenaga kerja muda yang terlibat. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa bila tidak ada intervensi strategis, sistem pertanian nasional dapat mengalami krisis keberlanjutan. Oleh karena itu, keterlibatan generasi muda menjadi kebutuhan yang mendesak, tidak

hanya sebagai pewaris lahan, tetapi sebagai agen transformasi menuju pertanian modern, tangguh, dan berdaya saing.

Kementerian Pertanian merespons tantangan ini melalui berbagai program yang dirancang untuk memperkuat kapasitas dan motivasi generasi muda agar tertarik menggeluti sektor pertanian. Salah satu program andalan yang telah diluncurkan adalah Brigade Pangan. Program ini bukan sekadar ajakan simbolik, melainkan sebuah inisiatif konkret yang menggabungkan semangat kewirausahaan anak muda, penerapan teknologi modern, dan prinsip keberlanjutan dalam satu gerakan nasional. Brigade Pangan melibatkan ribuan pemuda untuk turun langsung ke lapangan—mengelola lahan, mengoperasikan alat dan mesin pertanian modern, serta menerapkan sistem budidaya yang berbasis efisiensi dan produktivitas tinggi.

Melalui program ini, para petani muda terlibat aktif dalam optimalisasi lahan tidur dan pembukaan sawah baru di berbagai daerah. Mereka tidak hanya dibekali alat, tetapi juga pendampingan teknis, pelatihan manajemen usaha tani, serta akses terhadap permodalan dan pemasaran. Pendekatan ini membentuk ekosistem pertanian yang memberdayakan, bukan mengeksploitasi. Generasi muda diajak untuk melihat pertanian bukan sebagai pekerjaan kasar dan tradisional, tetapi sebagai sebuah industri masa depan yang menantang, menguntungkan, dan bermartabat.

Kenyataannya, banyak anak muda masih memandang sektor pertanian sebagai pilihan karier terakhir. Daya tariknya rendah karena stigma sosial yang melekat, keterbatasan akses terhadap lahan, serta ketidakpastian pendapatan. Untuk itu, strategi penguatan SDM

pertanian muda harus bersifat menyeluruh yaitu menciptakan insentif ekonomi yang menjanjikan, membangun narasi positif tentang profesi petani, serta menghubungkan pertanian dengan identitas generasi muda yang dinamis dan melek teknologi. Dalam konteks ini, penggunaan alsintan (alat dan mesin pertanian) bukan hanya mendongkrak produktivitas, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri karena erat dengan citra modern dan efisien yang disukai generasi Z.

Sebagai bukti nyata, lebih dari 1.000 anak muda telah bergabung dalam program ini dan terjun langsung mengelola lahan pertanian dengan bantuan teknologi mekanisasi. Mereka menggunakan traktor roda empat, *rice transplanter*, *drone* pertanian, dan mesin panen modern untuk menggantikan tenaga kerja konvensional yang semakin mahal dan sulit diperoleh.

Pemerintah juga mendorong akses terhadap hibah dan bantuan alsintan untuk kelompok tani milenial, agar adopsi teknologi tidak terbentur oleh kendala biaya awal. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan kemudahan bagi generasi muda untuk menjadikan pertanian sebagai pilihan hidup utama.

Tidak hanya soal teknologi, aspek penghasilan juga menjadi titik masuk penting untuk menarik generasi milenial dan Gen Z. Dalam berbagai simulasi bisnis tani modern, penerapan sistem pertanian berbasis teknologi dan skala ekonomi diyakini mampu memberikan potensi pendapatan bersih minimal Rp10 juta per bulan bagi petani muda yang konsisten dan serius. Narasi keberhasilan seperti ini perlu diperluas dan direplikasi agar tumbuh keyakinan bahwa bertani adalah

pekerjaan masa depan—profesi yang tak hanya mulia, tetapi juga menguntungkan.

Dengan mengintegrasikan pelatihan, insentif, dan teknologi, serta membangun ekosistem pendukung yang holistik, pertanian Indonesia dapat membalikkan tren krisis regenerasi. Jika generasi muda diberikan panggung yang tepat, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi pelopor swasembada pangan di era baru. Pertanian bukan sekadar bertahan, melainkan bangkit dan maju bersama kekuatan muda yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing tinggi.



Gambar 15. Bantuan Alsintan untuk petani milenial yang tergabung dalam rigade Pangan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

2. Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian serta Infrastruktur Dasar

Pada era pertanian modern, cangkul dan kerbau tak lagi menjadi simbol utama kerja di sawah. Transformasi teknologi telah menggeser paradigma pertanian dari kegiatan yang mengandalkan kekuatan fisik menjadi sistem produksi berbasis efisiensi, presisi, dan keberlanjutan. Salah satu penggerak utama dari perubahan ini adalah ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Keberadaan alsintan seperti traktor, *rice transplanter*, *drone* penyemprot, dan *combine harvester* terbukti memainkan peran vital dalam meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya tenaga kerja, dan mempercepat proses dari tanam hingga panen.

Salah satu contoh paling nyata adalah traktor roda dua dan roda empat yang telah menggantikan metode bajak tradisional dengan kerbau atau tenaga manusia. Berdasarkan pengalaman Kementerian Pertanian ketika mendampingi para petani di lapangan, pembajakan lahan secara manual memerlukan waktu hingga 3–5 hari per hektare, sementara dengan traktor roda empat, waktu tersebut dapat dipangkas menjadi hanya 4–6 jam per hektare. Efisiensi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memungkinkan petani mempercepat rotasi tanam dan menghindari risiko gagal tanam akibat cuaca yang tidak menentu.

Selanjutnya pada tahap penanaman, *rice transplanter* (mesin tanam padi) telah menjadi solusi atas kelangkaan tenaga kerja tanam serta rendahnya keseragaman pertumbuhan bibit padi. Jika secara manual satu orang buruh tanam membutuhkan waktu sekitar 250 jam

per hektare, maka *rice transplanter* hanya memerlukan sekitar 24–30 jam per hektare dengan hasil tanam yang lebih seragam dan teratur. Kerapian ini berdampak langsung pada kemudahan pemeliharaan tanaman serta optimalisasi hasil panen.

Tak kalah penting adalah peran *drone* penyemprot otomatis dalam perlindungan tanaman. Teknologi ini memungkinkan penyemprotan pestisida atau pupuk cair secara lebih merata dan presisi, terutama di lahan yang sulit dijangkau. Dengan kapasitas 10–20 liter per penerbangan dan area jangkauan hingga 2 hektare per jam, *drone* mampu menghemat hingga 90% air dan 30% pestisida dibandingkan penyemprotan manual, menurut laporan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan). Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga mendukung pertanian ramah lingkungan.

Pada saat panen, penggunaan *combine harvester* terbukti menjadi game-changer dalam meminimalisasi kehilangan hasil. *Combine harvester* yang menggabungkan fungsi memanen, merontokkan, dan membersihkan gabah dalam satu proses kerja mampu memanen satu hektare sawah dalam waktu 1–2 jam saja, jauh lebih cepat dibandingkan metode panen manual yang bisa memakan waktu 3 hari. Selain itu, tingkat kehilangan hasil (*losses*) pun menurun dari rata-rata 10% secara manual menjadi hanya sekitar 2–3% dengan *combine harvester*, sehingga meningkatkan hasil nyata yang diterima petani.

Namun, teknologi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan infrastruktur dasar pertanian yang memadai. Jaringan irigasi teknis dan tersier misalnya, memungkinkan petani mengatur pola tanam yang

lebih fleksibel dan melakukan tanam 2–3 kali setahun, terutama di daerah tadah hujan. Keberadaan jalan usaha tani mempercepat distribusi hasil panen dari sawah ke gudang atau pasar, mengurangi biaya logistik dan mencegah kerusakan produk. Gudang penyimpanan yang baik juga menjadi faktor penting dalam mengurangi kehilangan pascapanen dan menjaga kualitas hasil pertanian.

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi juga berdampak pada nilai ekonomi petani. Tanpa jalan yang memadai, gabah petani bisa dihargai lebih rendah di tingkat desa karena sulitnya akses pasar. Namun, dengan dukungan aksesibilitas dan fasilitas pascapanen yang lengkap, petani dapat menyimpan hasil, menjual di saat harga baik, dan memperluas akses ke rantai nilai yang lebih menguntungkan. Dengan kata lain, infrastruktur dasar adalah tulang punggung dari sistem agribisnis modern.

Modernisasi melalui alsintan dan infrastruktur juga membawa perubahan pada cara kerja petani. Kini, petani dapat merencanakan kegiatan budidaya dengan pendekatan berbasis data dan waktu kerja yang presisi. Risiko gagal panen akibat keterlambatan kerja, kelangkaan tenaga, atau cuaca ekstrem dapat ditekan. Pertanian juga menjadi lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan pasar.

Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari keberpihakan kebijakan pemerintah. Program bantuan alsintan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan lumbung pangan desa, serta akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian menjadi komponen penting dari strategi nasional dalam mewujudkan pertanian yang

modern dan tangguh. Dengan pendekatan ilmiah, berbasis teknologi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, cita-cita kedaulatan dan swasembada pangan bukan lagi slogan semata, tetapi target yang semakin nyata dalam jangkauan.

3. Pemanfaatan Produk *Bioscience*

Perkembangan ilmu biosains (*bioscience*) telah membuka peluang baru bagi percepatan pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Bila pada masa lalu peningkatan produksi padi dan komoditas strategis sangat bergantung pada perluasan lahan (ekstensifikasi) dan optimalisasi input kimia (intensifikasi), maka kini arah pembangunan pertanian bergeser menuju pendekatan yang lebih berbasis ilmu pengetahuan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Biosains menghadirkan inovasi nyata yang memungkinkan peningkatan produktivitas sekaligus menjaga kesehatan ekosistem pertanian.

Salah satu terobosan penting adalah pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas unggul berdaya hasil tinggi (*high-yielding varieties*/HYV). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (kini menjadi BRIN dan Balitbang Kementan) telah merilis berbagai varietas padi unggul, seperti Inpari 32 HDB, Inpari 42 Agritan GSR, dan Inpari IR Nutri Zinc. Varietas ini tidak hanya berdaya hasil tinggi, dengan potensi produktivitas mencapai 7–9 ton per hektar, tetapi juga tahan terhadap hama, penyakit, serta cekaman lingkungan. Data Kementan (2023) mencatat bahwa penggunaan varietas unggul berkontribusi sekitar 56% terhadap peningkatan produktivitas padi nasional, menjadikannya salah satu faktor kunci yang mencegah Indonesia dari lonjakan impor beras lebih besar pada saat terjadi El Niño tahun 2023.

Selain varietas unggul, pengembangan *biofertilizer* (pupuk hayati) mulai mendapatkan perhatian serius. Pupuk ini mengandalkan mikroba seperti *Azospirillum*, *Rhizobium*, dan *Trichoderma* yang mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara di tanah secara alami. Hasil penelitian Balai Penelitian Tanah menunjukkan bahwa penggunaan biofertilizer dapat mengurangi ketergantungan pupuk kimia hingga 30–40%, tanpa menurunkan hasil panen. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan pasokan pupuk bersubsidi serta fluktuasi harga pupuk global akibat geopolitik.

Lebih jauh, biopestisida juga menjadi bagian penting dalam pertanian modern berbasis biosains. Indonesia selama ini menghadapi masalah residu pestisida kimia yang mengancam kesehatan manusia, merusak lingkungan, dan menurunkan kualitas ekspor. Dengan biopestisida berbahan mikroba, jamur entomopatogen, atau ekstrak tumbuhan, serangan hama dapat ditekan secara ramah lingkungan. Sebagai contoh, penggunaan *Beauveria bassiana* terbukti efektif mengendalikan hama wereng batang cokelat yang menjadi momok dalam produksi padi. Data FAO (2022) menunjukkan bahwa penggunaan biopestisida secara global meningkat lebih dari 10% per tahun, dan Indonesia diharapkan bisa menjadi bagian dari tren ini untuk menjaga keberlanjutan produksi.

Penerapan biosains tidak berhenti pada produksi primer, melainkan juga menyentuh aspek ketahanan pangan secara lebih luas. Melalui rekayasa bioteknologi, tanaman dapat diperkaya dengan nutrisi tertentu (biofortifikasi) guna mengatasi masalah gizi masyarakat. Contoh nyata adalah varietas Inpari IR Nutri Zinc yang

mengandung kadar seng lebih tinggi, membantu mengurangi stunting yang masih menjadi masalah kesehatan publik di Indonesia. Program ini sejalan dengan target pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024, dan pertanian biofortifikasi memberi kontribusi nyata dalam pencapaiannya.

Dengan demikian, pemanfaatan biosains dalam pertanian Indonesia bukan sekadar jargon, melainkan sebuah langkah konkret menuju transformasi. Penggunaan varietas unggul, biofertilizer, biopestisida, dan biofortifikasi membuktikan bahwa Indonesia serius menapaki jalan pertanian modern yang berbasis ilmu pengetahuan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, pendekatan ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional, menurunkan ketergantungan impor, serta menyiapkan fondasi yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim dan dinamika global di masa depan.

4. Hilirisasi Pertanian

Pembangunan pertanian tidak lagi cukup jika hanya bertumpu pada keberhasilan produksi di tingkat hulu. Tantangan zaman telah berubah—di tengah gelombang globalisasi, krisis iklim, dan disrupsi teknologi—pertanian Indonesia dituntut tidak hanya mampu memberi makan rakyatnya, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Maka dari itu, hilirisasi bukan sekadar pilihan, melainkan keniscayaan yang harus dihadapi dengan strategi, keberanian, dan keberpihakan pada pelaku utama sektor ini: para petani.

Hilirisasi pertanian adalah proses mengolah hasil pertanian mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Ini mencakup aktivitas pascapanen seperti pengeringan, pengemasan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran, baik di dalam negeri maupun ke pasar ekspor. Melalui hilirisasi, komoditas pertanian yang dulunya dijual dalam bentuk curah kini bisa hadir sebagai produk akhir yang menarik, tahan lama, dan bernilai jual tinggi—dari biji kopi menjadi *specialty coffee*, dari singkong menjadi tepung bebas gluten, dari rempah-rempah menjadi *essential oil*, hingga dari pisang menjadi keripik premium dengan merek lokal yang mendunia.

Selama ini, sebagian besar keuntungan dari komoditas pertanian Indonesia justru dinikmati oleh pelaku industri besar dan distributor di luar negeri. Kita menanam dan memanen, tapi nilai tambah ekonomi justru dinikmati pihak lain yang mengolah, mengemas, dan menjual kembali produk kita dalam bentuk akhir. Paradoks ini tidak boleh terus berlanjut. Hilirisasi adalah jalan untuk membalik keadaan—agar nilai tambah yang selama ini "terbang" ke luar negeri, bisa kembali dan dinikmati oleh petani, koperasi, dan pelaku usaha kecil menengah di desa-desa.

Langkah strategis dalam hilirisasi tidak berdiri sendiri. Ia membutuhkan fondasi kuat dari sektor hulu yang produktif dan efisien. Tanpa benih unggul, praktik budidaya modern, dan alsintan yang mumpuni, mustahil menghasilkan bahan baku yang berkualitas untuk masuk ke rantai hilir. Begitu pula sebaliknya, tanpa hilirisasi, hasil pertanian unggul hanya akan terjebak pada fluktuasi harga pasar dan tekanan tengkulak. Karena itu, transformasi pertanian mesti bersifat

menyeluruh—dari hulu yang kuat hingga hilir yang bernilai tambah tinggi, dengan satu tujuan utama: menyahterakan petani.

Indonesia sejatinya memiliki komoditas yang sangat potensial untuk hilirisasi berbasis ekspor. Berikut beberapa komoditas tersebut:

- Kopi: Indonesia adalah produsen kopi ke-4 terbesar di dunia, namun ekspor kopi kita didominasi oleh bentuk *green bean*. Padahal, ketika kopi diolah menjadi *roasted bean*, kapsul kopi, atau produk siap seduh, nilainya bisa naik 3–5 kali lipat. Negara seperti Italia dan Jerman meraup untung besar dari kopi Indonesia hanya karena mereka menguasai sisi hilir.
- Rempah-rempah: cengkeh, lada, pala, dan kayu manis Indonesia sangat diminati dunia. Namun kita sering menjualnya dalam bentuk curah dan belum menembus pasar premium seperti *essential oil* organik, bumbu siap saji, atau produk aromaterapi yang bernilai tinggi di pasar Eropa dan Amerika.
- Kakao: Sebagai produsen utama kakao dunia, Indonesia lebih banyak menjual biji mentah daripada produk olahan seperti *dark chocolate*, *cocoa butter*, atau *gourmet chocolate*, yang permintaannya sangat tinggi di segmen konsumen kelas menengah global.
- Hortikultura: Buah tropis seperti mangga, nanas, pisang, dan salak sangat diminati pasar ekspor. Namun pengemasan, standar mutu, dan ketelusuran (*traceability*) sering menjadi kendala. Padahal, dengan dukungan teknologi pascapanen dan pengolahan ringan, buah-buahan ini dapat dipasarkan dalam bentuk olahan seperti jus konsentrat, buah kering, atau camilan sehat berbasis buah lokal.

Transformasi hilirisasi bukan hanya tentang pembangunan pabrik atau teknologi pengolahan. Lebih dari itu, hilirisasi adalah proses membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif—di mana petani bukan hanya sebagai produsen, tetapi juga sebagai pemilik nilai. Koperasi tani dapat menjadi pelaku usaha pengolahan, anak-anak muda desa bisa menjadi operator mesin pengering dan pengemas, dan ibu-ibu rumah tangga bisa menjadi tenaga pemasaran melalui *e-commerce*.

Agar hilirisasi berjalan optimal, dibutuhkan keberpihakan nyata dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bentuknya antara lain: (1) insentif fiskal bagi pelaku industri kecil pengolahan pertanian; (2) dukungan pembiayaan melalui KUR dan pembiayaan syariah untuk membangun fasilitas pengolahan dan pengemasan; (3) fasilitasi sertifikasi mutu (SNI, HACCP, GlobalGAP, atau organik) agar produk bisa menembus pasar internasional; (4) pembangunan sentra hilirisasi lokal yang terintegrasi dengan kawasan pertanian utama; dan (5) penguatan koperasi tani dan UMKM melalui pelatihan manajemen bisnis, pengolahan, dan pemasaran digital.

Dengan ekosistem hilirisasi yang sehat, hasil pertanian tidak lagi sekadar menjadi komoditas murah yang dijual di tengkulak, melainkan menjadi produk kebanggaan yang bernilai dan dihargai. Bayangkan jika pisang lokal bisa menjadi keripik pisang organik berlabel “*Made in Indonesia*” yang dijual di rak organik supermarket Tokyo. Contoh lain misalnya petani kopi di Toraja bisa menikmati hasil penjualan *single origin coffee* yang dibeli oleh pecinta kopi di Berlin dengan harga premium.

Visi besar hilirisasi pertanian bukan hanya soal peningkatan PDB atau ekspor, tetapi tentang keadilan ekonomi. Strategi hilirisasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pada periode 2025-2029 merupakan suatu upaya untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan petani, mengangkat ekonomi desa, dan membangun ketahanan nasional dari akar rumput. Melalui pendekatan ini, bertani bukan lagi sekadar bertahan hidup, tetapi menjadi jalan masa depan yang bermartabat.

E. Penguatan Kelembagaan Petani

Keberhasilan pembangunan pertanian dan pencapaian swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, infrastruktur, maupun kebijakan harga, melainkan juga oleh kekuatan kelembagaan petani. Kelembagaan yang kuat memungkinkan petani memperoleh akses lebih baik terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi, serta pasar. Lebih dari itu, kelembagaan petani juga menjadi wadah bagi terbangunnya solidaritas, konsolidasi usaha, serta terciptanya efisiensi dalam skala ekonomi.

Kementerian Pertanian menempatkan penguatan kelembagaan petani sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Proses ini dimulai dengan pembentukan Kelompok Tani (Poktan), yakni organisasi dasar petani di tingkat desa atau dusun yang berfungsi sebagai wadah belajar, wadah kerja sama, dan wahana produksi. Poktan-poktan tersebut selanjutnya didorong untuk berjejaring dan membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan berfungsi memperkuat skala usaha, memperluas akses pada program

pemerintah maupun lembaga keuangan, serta meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai nilai pertanian.

Langkah berikutnya adalah transformasi kelembagaan menuju bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Di tahap ini, Gapoktan diarahkan untuk berbadan hukum, baik melalui koperasi maupun perseroan terbatas (PT). Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mempermudah akses permodalan dari perbankan, serta memperluas jejaring kemitraan dengan sektor swasta. Contoh nyata dapat ditemukan pada Koperasi Mitra Tani Parahyangan di Garut, Jawa Barat, yang telah berhasil menembus pasar ekspor hortikultura, khususnya sayuran segar ke Singapura. Dengan kelembagaan yang berbadan hukum, koperasi ini mampu menjalin kontrak jangka panjang dengan perusahaan ritel modern, sesuatu yang sulit dicapai oleh petani perorangan.

Pada tahap yang lebih lanjut, Kementerian Pertanian mendorong terbentuknya Korporasi Petani, yakni konsolidasi kelembagaan yang beroperasi dengan prinsip bisnis modern, profesional, dan berorientasi pasar global. Korporasi petani diharapkan mampu mengelola rantai pasok dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan kepastian harga jual bagi petani setempat, sehingga mendorong peningkatan pendapatan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Pengembangan kelembagaan petani seperti ini menjadi krusial karena sebagian besar petani Indonesia masih mengelola lahan dalam skala kecil, rata-rata kurang dari 0,5 hektare per rumah tangga.

Tanpa kelembagaan, skala usaha yang kecil membuat mereka sulit bersaing dan rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Melalui kelembagaan, petani dapat memanfaatkan *economies of scale*, misalnya dengan membeli sarana produksi dalam jumlah besar sehingga lebih murah, menggunakan alat dan mesin pertanian secara kolektif, hingga memasarkan produk secara bersama-sama sehingga memperoleh posisi tawar yang lebih kuat.

Sebagai bagian penting dari perjalanan menuju swasembada pangan, proses penguatan kelembagaan petani kini mendapat pijakan lebih kokoh lewat kebijakan pembangunan kawasan pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian, yang mengatur bagaimana kawasan pertanian dikembangkan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan menghadirkan kerangka baru: Kawasan Pertanian berbasis Korporasi Petani.

Konsep ini merupakan sebuah model dimana petani tidak lagi berdiri sendiri, melainkan tergabung dalam jaringan usaha yang solid dan terintegrasi. Lewat pendekatan ini, setiap Kawasan Pertanian dijalin sebagai ekosistem usaha tani menyeluruh, mulai dari perencanaan spasial, pengadaan infrastruktur, aplikasi teknologi, hingga pembentukan korporasi petani. Lebih jauh, pengembangan korporasi didorong sebagai sinergi mandiri—seluruh elemen dalam kawasan bertumpu pada keberhasilan kolektif, inklusif, dan ekonomis.

Secara substantif, hal ini berarti strategi kelembagaan petani sejak awal (poktan → gapoktan → KEP → korporasi) kini terarah di kawasan-kawasan prioritas. Dengan arahan seperti ini, pemerintah

memastikan bahwa korporasi petani bukan *fragmentasi ad hoc*, tetapi bagian dari tata kelola strategis yang menyeluruh dan memiliki skala ekonomi, dukungan kelembagaan, dan orientasi pasar. Dengan demikian, narasi kelembagaan petani menjadi semakin kuat—bukan hanya soal organisasi internal petani, tetapi juga tentang bagaimana mereka menjadi unit ekonomi penting dalam ekosistem kawasan pertanian modern yang dikelola menurut peraturan yang sistematis dan berpijak pada integrasi regional

"...pangan bukan hanya komoditas ekonomi. Ia adalah pilar ketahanan nasional, simpul kesejahteraan rakyat, dan simbol kedaulatan sebuah bangsa."

BAB 4

PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN

Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, persoalan pangan bukan sekadar urusan dapur atau statistik produksi, namun sebagai persoalan eksistensial. Hal ini menentukan apakah sebuah bangsa dapat berdiri tegak di tengah dunia yang makin tak menentu. Dalam konteks negara agraris seperti Indonesia—dengan lebih dari 270 juta jiwa yang hidup di atas tanah subur dari Sabang hingga Merauke—pangan bukan hanya komoditas ekonomi. Ia adalah pilar ketahanan nasional, simpul kesejahteraan rakyat, dan simbol kedaulatan sebuah bangsa.

Namun, terlalu lama Indonesia terjebak dalam pendekatan yang normatif, prosedural, dan *business as usual*. Terlalu sering kita menyederhanakan soal pangan sebagai urusan teknis, padahal realitasnya jauh lebih kompleks dan menuntut keberanian untuk berpikir dan bertindak di luar kebiasaan. Itulah sebabnya, percepatan swasembada pangan tidak bisa lagi mengandalkan paradigma lama. Dibutuhkan loncatan cara pandang dan cara kerja. Diperlukan kebijakan yang tidak biasa-biasa saja.

Bab ini menguraikan secara mendalam bagaimana pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian, menerjemahkan urgensi swasembada pangan ke dalam aksi-aksi konkret, melalui empat pilar utama yaitu stabilisasi harga, pendampingan pertanian, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan data dan inovasi teknologi secara presisi.

Setiap kebijakan yang diambil tidak lagi semata untuk memenuhi target birokratis, melainkan untuk menyeimbangkan ekosistem pangan nasional agar petani untung, konsumen tenang, dan negara kuat. Mulai dari kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi (HET) yang menjadi jangkar stabilitas pasar, hingga gerakan pendampingan yang menembus batas geografis dan birokrasi—semuanya dirancang dengan satu misi yaitu mengangkat martabat petani Indonesia dan memastikan bahwa setiap butir beras yang dihasilkan negeri ini menjadi simbol dari kemerdekaan yang sejati.

Lebih dari itu, swasembada tidak bisa berdiri berdasarkan kerja satu lembaga. Hal tersebut hanya mungkin dicapai jika seluruh kekuatan bangsa digerakkan dalam orkestrasi besar yaitu TNI membantu pembukaan lahan dan distribusi pupuk, Polri menumpas mafia pangan, kampus menciptakan teknologi unggul, kementerian teknis membangun infrastruktur pendukung, dan desa-desa mengubah wajah pertanian melalui dana desa. Ini bukan kerja Kementan semata, melanjutkan kerja kolektif bangsadan hasilnya nyata.

Data BPS mencatat bahwa sektor pertanian tumbuh melesat 10,52% di triwulan pertama tahun 2025 dan menjadi penyangga utama ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Panen padi dan jagung meningkat pesat, konsumsi pangan melonjak, dan kontribusi pertanian terhadap PDB mencapai rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Bab ini akan membawa pembaca menyusuri perjalanan nyata—bukan sekadar mimpi—menuju swasembada pangan. Karena

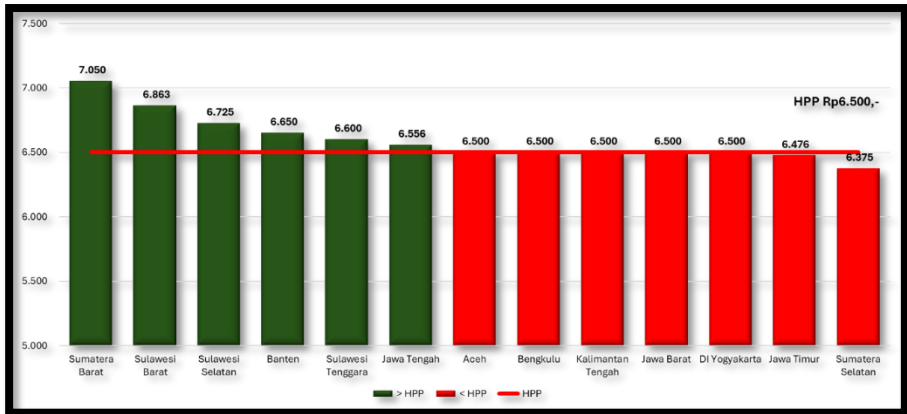
swasembada pangan bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan. Oleh karena itu, kita harus bergerak dengan keberanian yang luar biasa, dengan gagasan besar dan kerja keras yang melampaui zona nyaman.

A. Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Eceran Tertinggi

Harga pangan memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi, terutama di negara agraris seperti Indonesia. Fluktuasi harga yang ekstrem dapat berdampak negatif terhadap dua kelompok utama yaitu petani sebagai produsen, dan konsumen sebagai penerima manfaat. Agar dapat menjamin keseimbangan ini, pemerintah Indonesia telah lama mengatur harga melalui dua instrumen utama yaitu harga pembelian pemerintah (HPP) sebagai bentuk perlindungan bagi petani, dan harga eceran tertinggi (HET) sebagai pelindung bagi konsumen.

Pengaturan harga ini merupakan bentuk intervensi pasar yang sah dan dibenarkan secara ekonomi, bertujuan untuk mencegah kegagalan pasar akibat asimetri informasi, dominasi pedagang besar, atau ketidakstabilan dalam produksi dan distribusi. Dalam konteks

pangan strategis seperti beras, pengaturan HPP dan HET juga berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan stabilitas nasional.



Gambar 16. Harga rata-rata GPK di tingkat petani per 23 Maret 2025

Sumber: Presentasi Menteri Pertanian pada Musyawarah Nasional X HKTI dan Kongres Tani Indonesia (2025)

Pemerintah terus memperkuat komitmennya mewujudkan swasembada pangan dengan menargetkan penyerapan 3 juta ton gabah (setara beras) hingga April 2025, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan Perum Bulog agar segera melakukan penyerapan gabah petani sesuai HPP, guna menjaga stok pangan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan petani—terutama saat musim panen raya.

Bulog memegang peran kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui penyerapan produksi gabah domestik, yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas)

dan Peraturan Menteri Pertanian. Saat ini, kapasitas gudang Bulog mampu menampung stok hingga 1,5 juta ton, menjadi salah satu penopang utama dalam strategi pemerintah ini.

Tabel 3. Realisasi pengadaan gabah setara beras 2018–2025

Bulan	Tahun							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Januari	5.467	2.009	6.935	13.260	8.374	6.921	6.203	14.489
Februari	26.876	6.365	39.359	19.850	6.992	6.774	9.161	171.534
Maret	215.103	64.447	43.876	201.526	48.702	80.605	19.676	382.832
April	351.630	248.311	85.978	338.253	201.222	202.000	224.936	
Mei	272.124	305.516	251.072	134.729	138.684	268.417	393.913	
Juni	133.044	121.717	269.078	31.515	146.835	127.854	73.274	
Juli	238.172	129.882	168.927	79.769	73.771	69.875	47.049	
Agustus	124.562	86.654	63.874	107.692	33.018	41.339	54.654	
September	78.055	83.676	32.927	107.114	55.955	45.877	124.685	
Oktober	23.234	64.020	125.579	98.256	94.817	46.311	166.415	
November	12.681	55.517	143.782	29.881	137.658	65.880	126.529	
Desember	7.636	33.149	25.121	54.465	48.623	105.925	20.330	
Jumlah	1.488.584	1.201.263	1.256.508	1.216.310	994.651	1.067.778	1.266.825	568.855
Semester I	1.004.244	748.365	696.298	739.133	550.809	692.571	727.163	568.855
Semester II	484.340	452.898	560.210	477.177	443.842	375.207	539.662	

Sumber: BPS dan Pusdatin Kementan (Diolah 2025)

Stabilisasi harga komoditas pertanian, khususnya beras, merupakan salah satu kebijakan penting pemerintah Indonesia untuk

menjamin ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, HPP dan HET berperan sebagai instrumen pengendalian harga yang bertujuan untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan; menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen; mencegah spekulasi dan penimbunan oleh tengkulak atau pedagang besar. Kewajiban membeli gabah dengan HPP sebesar Rp6.500,00 per kilogram tidak hanya berlaku bagi Bulog dan pelaku penggilingan padi, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting agar nilai tukar petani (NTP) terus meningkat.

Kewajiban etis Kementerian Pertanian ialah mempertahankan HPP agar. Jika harga komoditas pertanian terus merosot, dampaknya bisa memicu peningkatan kemiskinan, kesulitan ekonomi bagi petani, serta kerugian finansial bagi negara. Sebagai upaya nyata, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp16 triliun dari APBN khusus untuk program penyerapan gabah. Dengan cadangan awal 2 juta ton di gudang Bulog yang tersebar di berbagai daerah, program ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

B. Peningkatan Intensitas Pengawasan dan Pendampingan

Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terhadap pencapaian swasembada pangan berlangsung secara intensif dan luar biasa. Dalam satu hari, jajaran pimpinan kementerian mampu melakukan kunjungan kerja ke empat provinsi berbeda. Komitmen tinggi ini terlihat dari padatnya agenda lapangan, hingga waktu

istirahat hanya dilakukan di dalam helikopter atau pesawat dalam perjalanan antarwilayah. Saat kunjungan kerja Menteri Pertanian di Pemalang, Jawa Tengah, bersama Panglima TNI, untuk memberikan arahan langsung kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan jajarannya, Menteri Pertanian memastikan proses pendaftaran varietas unggul berjalan lancar sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi.



Gambar 17. Kunjungan kerja Menteri Pertanian bersama Panglima TNI Agus Subiyanto pada acara Serbuan Teritorial, di Pemalang, Jawa Tengah, 19 Desember 2024.

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat, termasuk komunitas adat di wilayah terluar Indonesia. Melalui pendekatan yang inklusif,

Kementerian Pertanian menempatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam gerakan swasembada.

Wujud konkret dari komitmen ini tampak jelas di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Di kawasan tersebut, upaya pembukaan lahan sawah dan pengembangan sektor pertanian tidak semata-mata bertujuan meningkatkan hasil produksi, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat setempat. Inisiatif ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan menempatkan kesejahteraan warga sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian.

Dukungan diberikan melalui penyediaan sarana produksi pertanian, seperti hibah traktor roda empat dan roda dua, benih unggul, serta pupuk bersubsidi. Seluruh bantuan ini diarahkan untuk segera dimanfaatkan oleh generasi muda yang tergabung dalam Brigade Pangan yang merupakan sebuah inisiatif yang melibatkan generasi milenial dalam transformasi sektor pertanian.

Pengembangan pertanian di Wanam tidak terbatas pada komoditas padi, tetapi juga mencakup tanaman hortikultura dan jenis tanaman pangan lain yang secara tradisional dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Pemanfaatan alat mekanisasi pertanian diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, sekaligus mempercepat pengolahan lahan secara efisien dan berkelanjutan. Sinergi antara teknologi, sumber daya lokal, dan dukungan kelembagaan, transformasi pertanian di kawasan ini menjadi

bagian integral dari strategi besar menuju swasembada pangan yang adil dan merata.



Gambar 18. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Bersama Masyarakat Adat pada kunjungan kerjanya di Kampung Wanam, Distrik Ilwuyab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 24 November 2024

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

Komitmen Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan nasional tercermin dari intensitas dan cakupan pengawalan yang dilakukan secara menyeluruh, bahkan dalam waktu yang sangat terbatas. Salah satu bentuk nyata dari kesungguhan ini tampak dalam kunjungan kerja maraton yang dilakukan ketiga provinsi di Kalimantan—yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah—dalam satu hari pada November 2024.

Tujuan utama dari rangkaian kunjungan tersebut adalah untuk memperkuat strategi optimalisasi lahan pertanian sebagai fondasi peningkatan kapasitas produksi pangan nasional. Dalam berbagai pertemuan yang digelar, ditekankan pentingnya percepatan pembukaan lahan sawah baru yang produktif dan berkelanjutan. Selain itu, seluruh intervensi pendukung—mulai dari penyediaan sarana produksi, pelibatan petani milenial, hingga penerapan teknologi pertanian modern—telah dirancang secara sistematis untuk mendukung transformasi pertanian nasional.

Lebih dari sekadar rutinitas birokrasi, pengambilan keputusan strategis dalam sektor pertanian dilakukan secara intensif, bahkan pada hari libur. Penyelenggaraan rapat koordinasi di luar jam kerja menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan terobosan signifikan untuk mencapai swasembada pangan. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian sebagai pilar penting dalam memperkuat kedaulatan nasional.

Diskusi dalam forum-forum tersebut mengkaji secara komprehensif berbagai dimensi teknis dan kebijakan, mulai dari optimalisasi rantai distribusi, peningkatan efisiensi program bantuan pertanian di tingkat lokal, hingga sinkronisasi peran antar instansi terkait. Melalui pendekatan yang terkoordinasi dan berorientasi pada hasil, swasembada pangan tidak lagi dipandang sebagai cita-cita jangka panjang semata, melainkan sebagai tujuan strategis yang sedang diupayakan secara konkret.



Gambar 19. Penulis memberikan arahan pada Rakor Cetak Sawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, 21 November 2024

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

Optimalisasi lahan menjadi agenda strategis dalam memastikan peningkatan produksi padi dan beras nasional. Sepanjang tahun 2024, berbagai langkah intensif dilakukan melalui program optimalisasi lahan eksisting, proyeksi cetak sawah baru tahun 2025, serta pengembangan teknologi seperti pompanisasi di lahan tadah hujan dan penanaman padi gogo. Semua inisiatif ini dibahas secara maraton dalam berbagai forum tingkat nasional guna memastikan ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama pembangunan. Spiritnya jelas yaitu berlari lebih cepat untuk mencapai swasembada, menjamin ketersediaan pangan dalam negeri, dan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96, Kementerian Pertanian menegaskan kembali empat pesan utama dari Presiden Prabowo Subianto sebagai landasan ketahanan pangan nasional yang bermartabat. Pertama, menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas; kedua, memastikan efisiensi dalam penggunaan setiap rupiah anggaran yang tersedia; ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan; dan keempat, berkomitmen penuh untuk meraih swasembada pangan dalam waktu dekat.

Pesan-pesan ini tidak hanya ditujukan kepada birokrasi dan pelaku utama sektor pertanian, tetapi juga mengajak generasi muda untuk turut serta. Kaum muda perlu diberikan ruang seluas-luasnya untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi dalam transformasi pertanian nasional.

Kunjungan kerja ke berbagai daerah memperlihatkan semangat yang sama. Di Sulawesi Selatan, misalnya, seruan untuk mewujudkan swasembada pangan terus bergema. Peran penyuluh pertanian di wilayah ini sangat vital—mereka adalah jembatan strategis antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan petani. Oleh karena itu, penghargaan atas peran penyuluh perlu diwujudkan secara nyata, salah satunya melalui peningkatan dan penambahan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja mereka di lapangan.

Di sisi timur Indonesia, Program Percepatan Swasembada untuk Kesejahteraan Masyarakat terus digerakkan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Upaya ini tidak hanya menitikberatkan pada

pendampingan petani, tetapi juga pada perluasan mekanisasi pertanian sebagai bagian dari transformasi menuju pertanian modern. Presiden Prabowo menaruh perhatian besar agar Papua menjadi salah satu lumbung pangan strategis nasional. Cetak sawah baru, pembangunan saluran irigasi tersier, serta penyediaan benih gratis bagi petani yang berkomitmen mengembangkan pertanian modern menjadi bagian dari strategi besar tersebut. Merauke menjadi simbol harapan baru—bahwa swasembada pangan dapat dimulai dari wilayah perbatasan dan menjalar ke seluruh penjuru negeri.

C. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

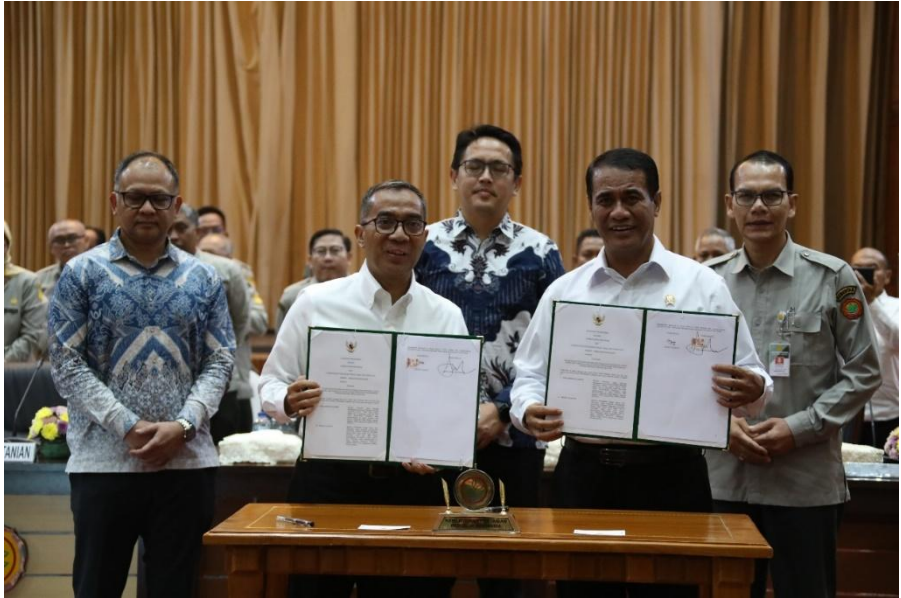
Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, khususnya antara dunia pendidikan tinggi dan institusi teknis pertanian. Sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, serta Teknologi memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat riset dan pengembangan berbasis inovasi serta teknologi pertanian.

Melalui kemitraan strategis ini, perguruan tinggi di Indonesia didorong untuk terlibat aktif dalam menciptakan solusi teknologi pertanian yang praktis, mudah diadaptasi, dan mampu meningkatkan hasil produksi secara nyata. Prioritas utama diberikan pada komoditas strategis yang produktivitasnya masih rendah namun berpengaruh besar pada ketahanan pangan nasional. Beberapa di antaranya

meliputi padi, jagung, bawang putih, tebu, sapi, kedelai, ubi kayu, dan gandum.

Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dan kualitas produksi untuk mendukung kemandirian pangan Indonesia. Nota Kesepahaman yang telah disepakati antara kedua kementerian menjadi payung kerja sama jangka panjang. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam mengonsolidasikan kekuatan riset nasional untuk menjawab tantangan sektor pertanian yang kompleks.

Salah satu target ambisius yang hendak dicapai adalah peningkatan produksi padi secara signifikan, dari rata-rata 10 ton menjadi 30 ton per hektare, melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Pembangunan pertanian modern membutuhkan ekosistem yang kuat antara lembaga riset, institusi pendidikan tinggi, dan para pelaku usaha tani. Dengan pendekatan kolaboratif ini, swasembada pangan bukan hanya menjadi target jangka pendek, melainkan sebuah fondasi jangka panjang bagi kedaulatan pangan Indonesia.



Gambar 20. Penandatanganan MoU Kementerian Pertanian bersama Kemendiktisaintek dan Forum Diskusi Perguruan Tinggi di Kantor Pusat Kementan, 24 Februari 2025

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2025)

Pembangunan pertanian tidak dapat berjalan sendiri. Untuk mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Salah satu wujud nyata kolaborasi ini adalah sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kepolisian RI dalam menggalakkan program penanaman jagung serentak. Inisiatif ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering dan area perkebunan di berbagai daerah, dengan target luasan tanam 1,7 juta

hektare. Melalui program ini, diharapkan produksi jagung nasional dapat bertambah hingga 4 juta ton atau mengalami peningkatan sekitar 25% dibandingkan produksi saat ini.

Beberapa provinsi dinilai strategis dalam pelaksanaan program ini, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Tengah. Tidak hanya berfokus pada perluasan lahan tanam, program ini juga menekankan penguatan infrastruktur pendukung, meliputi penyediaan benih berkualitas, jaringan irigasi, serta sarana produksi pertanian lainnya. Dalam implementasinya, peran Polri sangat krusial, terutama dalam menjamin distribusi sarana produksi berjalan lancar dan kegiatan di lapangan dapat beroperasi optimal—khususnya di daerah sentra produksi yang kerap menghadapi berbagai kendala.

Dalam pendekatan yang lebih inklusif, Kementerian Pertanian juga menjalin kerja sama dengan Detasemen Khusus (Densus 88) untuk membina dan memberdayakan mantan narapidana terorisme (napiter). Melalui sektor pertanian, kelompok ini diarahkan untuk menjadi tenaga produktif yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Pertanian tidak hanya menjadi sektor produksi, tetapi juga ruang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.

Kolaborasi strategis lainnya diwujudkan bersama Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dalam membangun kawasan pertanian modern di wilayah transmigrasi. Konsep kawasan ini dirancang secara terintegrasi, bukan parsial, dengan membangun wilayah yang mampu mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Wilayah seperti

Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan menjadi titik fokus pembangunan lumbung pangan baru. Tenaga kerja transmigran yang disiapkan Kementrans akan menjadi pengelola kawasan ini, yang didukung oleh sistem pertanian modern dan infrastruktur memadai.

Dengan fasilitas dan teknologi yang disediakan pemerintah, kawasan pertanian modern ini diharapkan mampu menghasilkan pendapatan petani hingga Rp10 juta per bulan, sebagaimana telah dicapai di beberapa wilayah seperti Merauke dan Aceh. Konsep ini menjadi contoh konkret bahwa pertanian mampu menjadi penggerak utama ekonomi perdesaan.

Dalam kerangka yang lebih luas, arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinergi antar kementerian untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. Kementerian Pertanian, TNI Angkatan Darat (TNI AD), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), serta lembaga-lembaga terkait lainnya dituntut bekerja bersama secara terintegrasi. Peran TNI AD tidak hanya sebatas pendampingan, tetapi juga pengawalan langsung di lapangan, khususnya dalam program peningkatan produksi padi.

Ketersediaan air menjadi faktor kunci dalam peningkatan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur irigasi menjadi agenda utama. Kolaborasi Kementan, KemenPU, dan TNI diarahkan untuk memperkuat irigasi pada total lahan sekitar 2,3 juta hektare. Rencana ini mencakup peningkatan produktivitas lahan pertanian seluas 851 ribu hektare, pembukaan 500 ribu hektare sawah baru, serta revitalisasi jaringan irigasi untuk 1 juta hektare lahan

pertanian yang sudah ada. Khusus untuk rawa, lahan tanam satu kali per tahun akan diubah menjadi tiga kali, sementara irigasi tersier dan sekunder akan dinormalisasi agar fungsi produksi kembali optimal.

Pemerintah telah menetapkan dua strategi besar untuk mempercepat swasembada pangan, yaitu ekstensifikasi melalui pencetakan sawah baru seluas 1,3 juta hektare dan intensifikasi melalui program optimasi lahan rawa. Kawasan seperti Kalimantan dan Jawa menjadi prioritas dalam implementasi strategi ini. Kesepakatan krusial telah diteken antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bentuk komitmen bersama mempercepat capaian tersebut.

Dalam memperkuat ketahanan pangan dari akar rumput, Gerakan Nasional Pangan Merah Putih digagas sebagai wujud sinergi antara Kementan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Melalui gerakan ini, desa menjadi ujung tombak penggerak swasembada pangan dan penyedia pangan bergizi. Dukungan diberikan dalam bentuk benih sayuran, cabai, umbi-umbian, unggas petelur, pakan, kandang, rumah benih, hingga pendampingan teknis. Peran Polri dalam pengawasan dan pembinaan menjadikan program ini lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.

Desa tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek aktif dalam pembangunan pangan. Pemerintah mengajak kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk menjadi penggerak utama program ini. Desa-desanya diharapkan mampu menjalankan klaster pertanian modern dengan target awal

1.000 desa pelaksana. Dukungan pemerintah tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga penyediaan pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Dalam kurun waktu 2015 hingga 2024, total penyaluran Dana Desa telah menyentuh angka Rp609 triliun. Pada tahun 2023, alokasinya mencapai Rp70 triliun dan diproyeksikan naik menjadi Rp71 triliun di tahun 2025. Pemerintah menetapkan bahwa setidaknya 20% dari anggaran tersebut harus dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong swasembada pangan. Melalui kolaborasi ini, desa-desa diharapkan dapat berkembang menjadi pusat perekonomian mandiri yang mampu mewujudkan kedaulatan pangan.

Tak kalah penting, dukungan dari DPR RI, khususnya Komisi IV, sangat diharapkan. Kementerian Pertanian menggandeng parlemen untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan pemberantasan mafia pangan yang selama ini merugikan petani. Pemerintah juga menargetkan optimalisasi 10 juta hektare lahan tidur untuk program cetak sawah, meski saat ini baru terealisasi sekitar 3 juta hektare, dengan 1 juta hektare berada di Merauke, Papua Selatan. Dukungan legislatif menjadi kunci keberlanjutan program ini agar target swasembada pangan nasional dapat segera tercapai.



Gambar 21. Penulis mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI membahas Program Cetak Sawah dan kegiatan strategis lainnya, 5 November

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

Upaya mewujudkan swasembada pangan memerlukan penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Pertanian, bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, terus menjalin kerja sama untuk memperkuat infrastruktur pertanian. Sinergi ini bertujuan mengatasi berbagai hambatan dalam penyediaan infrastruktur dasar, khususnya yang mendukung ketersediaan pangan nasional.

Salah satu inisiatif utama adalah pencetakan lahan sawah baru seluas tiga juta hektare, yang diperkuat dengan ketersambungan irigasi

dan bendungan yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Optimalisasi infrastruktur menjadi kunci keberhasilan program ini, seluruh bendungan dan saluran irigasi yang telah dibangun harus segera difungsikan secara maksimal agar suplai air bagi lahan pertanian tetap terjamin.

Sebagai bagian dari upaya inovasi, Kementerian Pertanian menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mempercepat pengembangan teknologi pertanian. Perguruan tinggi memegang peran kunci dalam menciptakan terobosan baru, melaksanakan riset berkualitas tinggi, serta meningkatkan kapabilitas SDM pertanian. Kerja sama ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, seperti penelitian kolaboratif, pelatihan petani dalam mengadopsi teknologi mutakhir, dan penerapan temuan riset untuk mendongkrak produktivitas serta efisiensi sektor pertanian. Pemerintah mendorong keterlibatan para akademisi terbaik dalam merancang solusi teknis terkait air, benih, hingga alat dan mesin pertanian modern.

Arah kebijakan swasembada pangan juga mendapat penegasan dari Presiden Prabowo Subianto. Pangan dipandang sebagai sektor yang paling fundamental, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global dan potensi krisis antarnegara. Selain mendukung ketahanan nasional, sektor pertanian juga menjadi tulang punggung dalam menjalankan program makan bergizi gratis, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Fokus pembangunan diarahkan pada pencetakan sawah di Kabupaten Merauke dan sejumlah wilayah lain, dengan pendekatan mekanisasi modern. Di sisi lain, pembentukan klaster pertanian modern yang

digerakkan oleh generasi muda menjadi prioritas transformasi menuju pertanian maju dan berkelanjutan.

Sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian penting dalam strategi nasional swasembada pangan. Keberhasilan produksi padi sangat bergantung pada ketersediaan pupuk yang memadai. Dalam hal ini, peran PIHC (Pupuk Indonesia *Holding Company*) di bawah Kementerian BUMN menjadi sangat krusial. Setelah produksi meningkat, kebutuhan akan lembaga penyangga seperti Bulog menjadi penting agar gabah petani terserap dengan harga yang wajar sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Semua elemen tersebut—produksi, distribusi, hingga stabilisasi harga—harus terkoordinasi secara optimal agar BUMN dapat menjalankan fungsinya secara sinergis dengan arah kebijakan pangan nasional.



Gambar 22. Pelantikan Kabinet Merah Putih 2024-2029, 21 Oktober 2024
Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

Setelah kembali dilantik sebagai pemimpin tertinggi di Kementerian Pertanian, semangat untuk memperjuangkan kedaulatan pangan Indonesia terus digelorakan. Cita-cita mewujudkan swasembada pangan bukanlah sekadar wacana, melainkan tekad yang diiringi program-program nyata dan berkelanjutan sebagai kelanjutan dari fondasi yang telah dibangun pada periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satu langkah strategis adalah pelaksanaan program

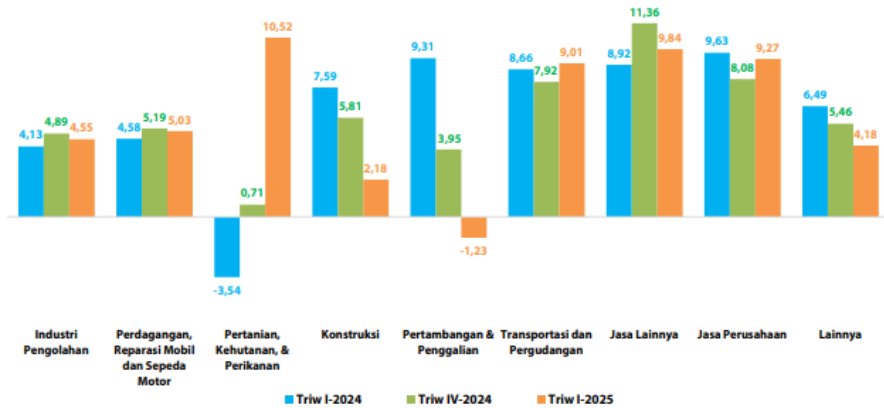
cetak sawah sebagai pengungkit transformasi pertanian, dari sistem tradisional menuju pertanian modern berbasis mekanisasi. Langkah ini juga dibarengi dengan penguatan kapasitas dan peran generasi muda di sektor pertanian.

Dalam semangat kolaborasi, Kementerian Pertanian turut menggandeng Perhimpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) untuk berkontribusi aktif dalam mendorong terwujudnya swasembada pangan. Himpuni merupakan wadah strategis yang terdiri atas putra-putri terbaik bangsa yang kini berkiprah di berbagai sektor, mulai dari birokrasi, akademisi, hingga dunia usaha. Peran mereka sangat potensial dalam mendukung modernisasi pertanian melalui kegiatan pendampingan, alih teknologi, dan penguatan kapasitas kelembagaan petani. Melalui jangkauan dan kompetensi anggotanya, Himpuni diharapkan menjadi mitra penting dalam mendorong lompatan produktivitas dan perluasan pasar, termasuk membuka peluang ekspor produk pertanian nasional secara lebih agresif. Kolaborasi ini menjadi simbol bahwa swasembada pangan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

D. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 4,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara umum, hampir seluruh sektor usaha mengalami peningkatan, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 1,23%. Salah satu sektor yang

mencatatkan lonjakan pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kenaikan mencapai 10,52%.

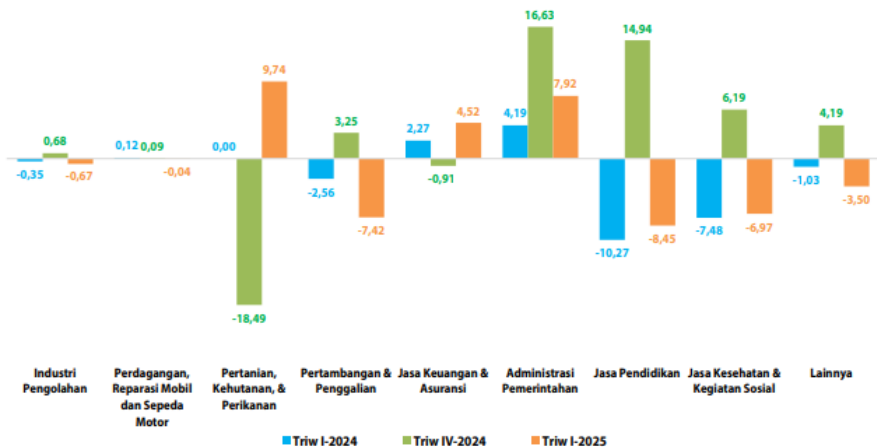


Gambar 23. Pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha (Y-on-Y) (persen), triwulan I-2024, triwulan IV-2024, dan triwulan I-2025

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS (2025)

Pertumbuhan signifikan juga terlihat pada sektor jasa lainnya (9,84%), Jasa perusahaan (9,27%), serta Transportasi dan Pergudangan (9,01%). Data ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi nasional berlangsung cukup merata, dengan sektor pertanian menjadi salah satu pendorong utama. Dari sisi produksi, sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi motor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2025. Pertumbuhan ini erat kaitannya dengan fenomena panen raya padi dan jagung yang berlangsung secara bersamaan, serta meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi menjelang bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri.

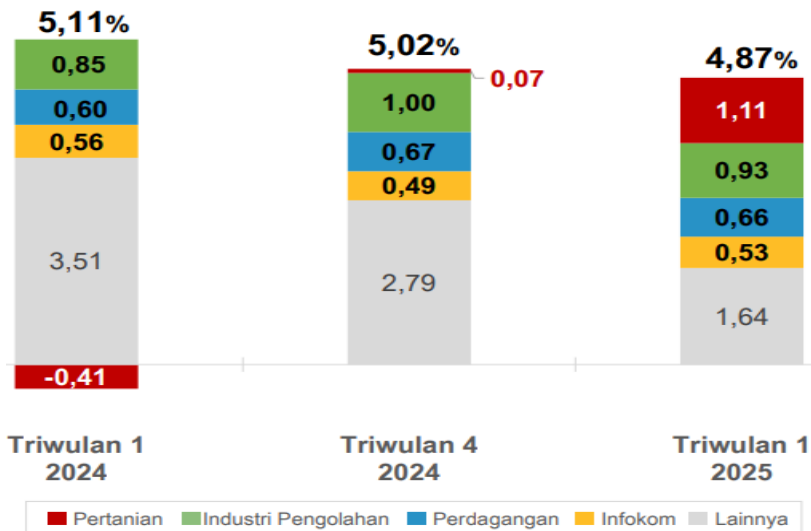
Pada sektor pertanian, lonjakan produksi tanaman pangan mencapai 42,26%, yang sebagian besar dipengaruhi oleh hasil panen padi dan jagung yang melimpah. Selain itu, sektor peternakan juga mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 8,83%, seiring dengan meningkatnya kebutuhan domestik akan produk daging dan telur selama periode tersebut. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan peran strategis sektor pertanian dalam menopang perekonomian nasional, tetapi juga menggambarkan sinergi antara musim panen dan pola konsumsi masyarakat yang mampu memperkuat dinamika ekonomi secara keseluruhan.



Gambar 24. Pertumbuhan PDB beberapa lapangan usaha (Q-to-Q) (persen), triwulan I-2024, triwulan IV-2024, dan triwulan I-2025

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS (2025)

Kondisi pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2025, yang didorong oleh sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, mencerminkan keterkaitan erat antara dinamika produksi dan konteks sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Panen raya padi dan jagung yang terjadi secara bersamaan tidak hanya meningkatkan pasokan pangan nasional, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan petani di wilayah sentra produksi. Sementara itu, meningkatnya permintaan domestik terhadap bahan pangan seperti daging dan telur selama bulan Ramadan dan hari raya Idulfitri menunjukkan adanya siklus musiman konsumsi yang kuat, yang secara langsung mendorong perputaran ekonomi di tingkat rumah tangga.



Gambar 25. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1-2025

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS (2025)

Pada triwulan I tahun 2025 (*year-on-year*), sektor pertanian tercatat sebagai penyumbang pertumbuhan tertinggi terhadap perekonomian nasional, dengan kontribusi sebesar 1,11%. Capaian ini menegaskan peran strategis sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, terutama dalam situasi yang menuntut ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Kontribusi ini bahkan melampaui sektor-sektor besar lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, dan informasi komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi dasar, tetapi juga semakin relevan sebagai pendorong utama pertumbuhan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, khususnya di wilayah perdesaan.

Dari sisi kebijakan, keberhasilan ini turut dipengaruhi oleh program-program pemerintah yang mendukung ketersediaan sarana produksi, distribusi logistik yang lebih lancar, serta akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha mikro. Selain itu, adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat infrastruktur pertanian dan menjaga stabilitas harga pangan berkontribusi besar dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih tangguh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan sektor-sektor kunci ini tidak hanya menjadi indikator makroekonomi, tetapi juga cerminan dari efektivitas intervensi kebijakan dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis kerakyatan.

BAB 5

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SWASEMBADA BERKELANJUTAN

Swasembada pangan telah lama menjadi agenda strategis pembangunan nasional dalam rangka mencapai kemandirian bangsa dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Namun, dalam realitas global yang kian kompleks—dengan tantangan seperti perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan transformasi sosial ekonomi pedesaan—konsep swasembada tidak lagi cukup dimaknai sekadar sebagai peningkatan produksi.

Swasembada yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terpadu. Tujuan utamanya tidak hanya sebatas pada tersedianya pangan dalam jumlah cukup, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan ekologis, peningkatan kesejahteraan petani, dan penguatan ketahanan sistem pangan nasional terhadap berbagai tekanan eksternal. Dengan kata lain, swasembada pangan masa kini harus dilandasi oleh prinsip keadilan, keberlanjutan, dan ketahanan multidimensi—baik dari sisi produksi, distribusi, hingga konsumsi.

Strategi Pencapaian Swasembada Pangan Nasional



Gambar 26. Strategi Swasembada Pangan Berkelanjutan

Sumber: Presentasi Menteri Pertanian pada Rapat Kerja Nasional Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) di Jakarta (2025)

Upaya mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di Indonesia harus berpijak pada tiga pilar utama: ekologi, ekonomi, dan sosial. Dari dimensi ekologis, dibutuhkan strategi konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam secara sistematis. Upaya ini meliputi pemanfaatan lahan-lahan yang selama ini kurang produktif—seperti lahan rawa dan lahan kering—secara lebih optimal, penerapan teknologi irigasi presisi guna meningkatkan efisiensi penggunaan air, serta penerapan metode pertanian yang berwawasan lingkungan dan mampu beradaptasi terhadap dinamika iklim yang berubah-ubah.

Dari sisi ekonomi, keberlanjutan swasembada pangan akan tercapai jika rantai nilai pertanian diperkuat. Hal ini meliputi peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian pascapanen, perluasan akses petani terhadap pembiayaan yang

inklusif dan berkelanjutan, serta jaminan harga yang adil melalui mekanisme instrumen Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang efektif.

Sementara itu, aspek sosial menjadi fondasi penting yang tidak bisa diabaikan. Swasembada pangan hanya akan bertahan jika petani diberdayakan secara aktif, generasi muda dilibatkan dalam proses modernisasi pertanian, dan kelembagaan lokal seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperkuat sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas.

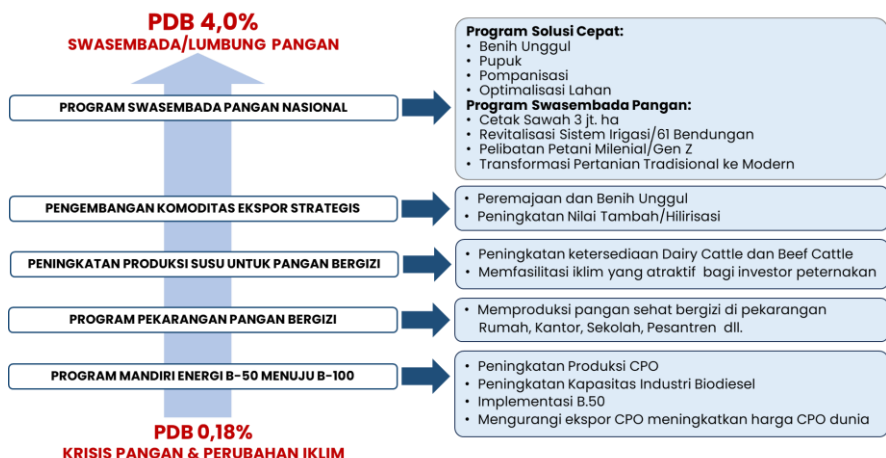
A. Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Swasembada Berkelanjutan

Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya dalam mencapai target swasembada pangan secara berkelanjutan. Strategi yang diterapkan bertumpu pada dua pendekatan utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi, yang diperkuat dengan dukungan pertanian modern, pengembangan sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor.

Pendekatan intensifikasi diarahkan pada peningkatan indeks pertanaman, khususnya di lahan-lahan yang telah tersedia, seperti di Pulau Jawa. Upaya ini mencakup peningkatan produktivitas melalui penggunaan teknologi pertanian, benih unggul, pemupukan berimbang, dan sistem irigasi yang efisien. Sementara itu, pendekatan ekstensifikasi difokuskan pada perluasan areal tanam, termasuk program cetak sawah seluas tiga juta hektare di wilayah potensial di luar Jawa.

Transformasi pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian modern menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan

produktivitas. Modernisasi pertanian memungkinkan peningkatan hasil panen hingga dua kali lipat, sekaligus menekan biaya produksi secara signifikan. Sebagai contoh, kegiatan panen yang secara tradisional memerlukan sekitar 25 orang, kini dapat dilakukan hanya oleh satu operator menggunakan *combine harvester* dalam waktu sekitar empat jam.



Gambar 27. Ringkasan *blueprint* swasembada pangan

Sumber: Presentasi Menteri Pertanian pada Musyawarah Nasional X HKTI dan Kongres Tani Indonesia (2025)

Untuk merespons tantangan krisis pangan global sekaligus mendorong tercapainya swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah menyusun berbagai langkah strategis yang terangkum dalam sebuah rancangan induk (*blueprint*) pembangunan pangan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi panduan arah kebijakan dan

pelaksanaan program yang terintegrasi dalam mendukung kemandirian pangan nasional. Strategi utama yang diambil mencakup pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, dengan dukungan kebijakan, teknologi, dan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian.

Upaya intensifikasi pertanian dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan benih unggul, menyalurkan pupuk secara tepat sasaran, dan menerapkan program pompanisasi di berbagai sentra produksi pangan, termasuk di kawasan aliran sungai besar seperti Bengawan Solo, Cimanuk, dan Brantas. Di samping itu, pada tahun 2025, pemerintah menargetkan optimalisasi lahan rawa seluas 500.000 hektare sebagai prioritas utama, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sementara itu, strategi ekstensifikasi diarahkan pada pembukaan lahan pertanian baru seluas tiga juta hektare. Lahan ini tersebar di berbagai wilayah potensial, seperti Merauke (1 juta hektare), Kalimantan Tengah (500.000 hektare), Kalimantan Selatan (300.000 hektare), Sumatra Selatan (200.000 hektare), serta beberapa daerah lainnya seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sumatera Utara. Untuk menjamin ketersediaan air yang stabil, Kementerian Pertanian juga memprioritaskan revitalisasi bendungan-bendungan baru agar mampu mendukung sistem irigasi secara efektif dan efisien.

Transformasi pertanian turut melibatkan petani milenial dan generasi Z secara aktif. Pelibatan ini mencakup pemanfaatan potensi

geografis, topografi, serta adaptasi terhadap iklim dan budaya lokal. Melalui penerapan pertanian modern, efisiensi biaya produksi diharapkan meningkat secara signifikan—dapat ditekan hingga 50%—dengan peningkatan hasil panen mencapai dua kali lipat.

Langkah-langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2025 terus diperkuat, termasuk percepatan program Cetak Sawah, Optimalisasi Lahan (*Oplah*), dan penyediaan sarana serta prasarana produksi. Empat program prioritas nasional yang menjadi fokus kepemimpinan Presiden Prabowo mencakup swasembada pangan, pemenuhan pangan bergizi, pengembangan *biofuel*, dan hilirisasi produk pertanian. Kementerian Pertanian didorong untuk memberi perhatian utama pada pencapaian swasembada pangan dan mendukung keberhasilan program pangan bergizi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, program cetak sawah dan optimalisasi lahan terus dipacu agar produksi padi nasional dapat ditingkatkan secara signifikan. Seluruh jajaran Kementerian Pertanian didorong untuk bekerja secara optimal, tanpa mengenal waktu dan kondisi, termasuk di tengah suasana ibadah puasa dan hari libur. Komitmen ini tercermin dalam pelaksanaan rapat kerja pimpinan pada hari Minggu, 2 Maret 2025 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, yang membahas topik-topik krusial seperti realisasi distribusi bantuan alat dan mesin pertanian (*alsintan*), ketersediaan benih dan pupuk, serta penguatan pengelolaan sumber daya manusia pertanian untuk mendukung peningkatan produksi dalam beberapa bulan ke depan.



Gambar 28. Penulis selaku Menteri Pertanian memimpin rapat di hari kedua puasa, 2 Maret 2025

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2025)

Sebagai bagian dari strategi percepatan swasembada pangan, Kementerian Pertanian menetapkan target agar Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu dari tiga provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Target ini sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas produksi melalui pendekatan menyeluruh, mulai dari perluasan lahan hingga modernisasi pertanian.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, pemerintah menyiapkan tambahan satu juta hektare lahan baru untuk budi daya padi, dengan tahap awal pengembangan seluas 150.000 hektare

dimulai pada tahun berjalan. Perluasan ini difokuskan di wilayah-wilayah potensial, termasuk Sumatera Selatan, sebagai bagian dari strategi ekstensifikasi nasional.

Selain memperluas cakupan lahan, akselerasi modernisasi pertanian juga menjadi prioritas utama. Penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) dalam jumlah besar diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara signifikan. Dengan pemanfaatan alsintan yang optimal, beban kerja petani dapat dikurangi, waktu panen dipercepat, dan hasil panen dapat dimaksimalkan.

Kesuksesan program ini ditentukan oleh seberapa kuat kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjal. Dalam hal ini, memperkuat koordinasi dengan dinas pertanian di daerah, kelompok tani, serta para pelaku usaha di sektor pertanian menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan yang dirancang dapat benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran di tingkat lapangan. Penyuluh pertanian juga memiliki peran vital sebagai jembatan informasi dan pendamping teknis bagi petani, terutama dalam mentransformasikan praktik pertanian menuju sistem yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.



Gambar 29. Penulis selaku Menteri Pertanian menghadiri Rakor LTT dan Serap Gabah Provinsi Sumatra Selatan, 4 Maret 2025

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2025)

B. Upaya Penguatan Swasembada Keberlanjutan

Peningkatan swasembada pangan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan pertanian Indonesia. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan domestik secara berkelanjutan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Sebagai elemen yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan tersebut, peran penyuluh pertanian sangat penting, mengingat mereka adalah ujung tombak dalam implementasi kebijakan pertanian di lapangan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian sepakat untuk menarik kewenangan pengelolaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ke tingkat pusat. Kebijakan ini diambil agar fokus percepatan swasembada pangan dapat lebih terarah dan terintegrasi di tingkat pusat, yakni di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Melalui langkah ini, semua penyuluh yang sebelumnya tersebar di berbagai daerah akan berada di bawah pengelolaan langsung pusat.

Langkah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan, guna memastikan tercapainya target swasembada pangan. Pemerintah menargetkan bahwa swasembada pangan, khususnya untuk komoditas beras dan jagung, dapat tercapai sebelum tahun 2027. Dengan waktu yang terbatas, pengelolaan yang terpusat diharapkan dapat mempercepat proses pencapaian tersebut dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat lebih cepat dirasakan hasilnya di lapangan.



Gambar 30. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan bersama penulis selaku Menteri Pertanian saat Konferensi Pers Rakortas Bidang Pangan, 28 November 2024

Sumber: Dokumentasi Kementerian Pertanian (2024)

Jumlah penyuluh pertanian di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, hingga mencapai 53 persen dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini berimbas pada terbatasnya pendampingan yang dapat diberikan kepada petani di lapangan. Saat ini, rasio penyuluh terhadap desa sangat tidak ideal, dengan rata-rata seorang penyuluh di Jawa menangani dua desa, sedangkan di luar Jawa ada seorang penyuluh yang bertanggung jawab hingga lima desa. Padahal dalam kondisi yang optimal, setiap desa seharusnya memiliki satu penyuluh yang dapat fokus memberikan bimbingan dan pendampingan langsung kepada petani.

Sebagai garda terdepan dalam pendampingan petani, penyuluh pertanian memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan berbagai program pembangunan sektor pertanian. Menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi, Presiden Prabowo mengambil kebijakan strategis dengan memusatkan pengelolaan penyuluh di tingkat nasional. Kebijakan ini secara resmi dituangkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Peran Penyuluh Pertanian untuk Percepatan Swasembada Pangan. Berdasarkan langkah ini, diharapkan terjadi peningkatan efektivitas pendampingan penyuluh guna mendorong pencapaian swasembada pangan secara lebih efisien dan berkelanjutan.



Gambar 31. Presiden Prabowo dalam Pidato Perdananya setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, menekankan Ketahanan dan Swasembada Pangan Prioritas Utama Pemerintah, 20 Oktober 2024

Sumber: Dokumentasi Sekretariat Negara (2024)

Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan bahwa ketahanan pangan dan swasembada pangan merupakan fokus utama pemerintah, dengan target pencapaian dalam waktu relatif cepat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kecukupan pangan seluruh masyarakat tanpa bergantung pada impor. Potensi besar Indonesia di sektor pertanian harus dimaksimalkan guna mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dinilai krusial untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi kelaparan, serta mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bersama. Di sisi lain, tantangan seperti dinamika iklim, fluktuasi ekonomi global, dan kemajuan teknologi juga perlu diantisipasi dalam menyusun strategi ketahanan pangan berkelanjutan.

Masyarakat dan petani di Indonesia memiliki harapan besar kepada langkah-langkah yang akan diambil pemerintah. Mereka menginginkan agar kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya terfokus pada peningkatan produksi pangan semata, tetapi juga memperhatikan kemudahan akses terhadap sarana pertanian yang lebih modern, seperti alat dan mesin, benih berkualitas, serta pelatihan yang relevan. Di samping itu, aspek pembiayaan dan pemasaran hasil panen menjadi perhatian penting dengan tujuan akhir meningkatkan pendapatan petani dan mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi keluarga petani di seluruh pelosok negeri.

BAB 6

MEMBUMIKAN MIMPI SWASEMBADA, MENYEMAI KEDAULATAN PANGAN

Swasembada pangan bukan sekadar target program atau jargon pembangunan. Ia adalah gambaran ideal tentang suatu bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya dengan hasil jerih payah sendiri—dari tanah yang ia miliki, dengan tangan-tangan petani yang bekerja, dan sistem yang dibangun secara mandiri. Dalam konteks Indonesia, swasembada pangan juga merupakan fondasi penting bagi stabilitas nasional, ketahanan sosial, dan kemerdekaan dalam arti yang lebih luas.

Buku ini telah memaparkan dengan cukup terperinci bagaimana Kementerian Pertanian mengambil peran strategis dalam menjawab tantangan besar tersebut. Kita telah membahas bagaimana ekstensifikasi dilakukan melalui pembukaan lahan baru, termasuk optimalisasi lahan rawa yang selama ini terabaikan. Program *food estate* yang dijalankan di beberapa wilayah prioritas bukanlah sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari strategi besar untuk memperluas basis produksi pangan nasional.

Di sisi lain, intensifikasi terus didorong secara sistematis: mulai dari pemanfaatan irigasi pompanisasi, mekanisasi pertanian, penyediaan benih unggul, hingga distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Di balik semua itu, ada upaya membangun sistem pertanian yang lebih modern—yang tidak hanya mengandalkan kerja

keras petani, tetapi juga menyandarkan diri pada ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi.

Kementerian Pertanian juga memberi perhatian besar pada penguatan kapasitas kelembagaan petani. Kita tidak hanya bicara soal produksi, tetapi juga tentang bagaimana petani dapat lebih berdaya dalam mengakses pasar, mengelola risiko, dan meraih nilai tambah. Pendampingan melalui penyuluh pertanian, pembentukan korporasi petani, serta digitalisasi layanan dan informasi pertanian menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem yang tangguh.

Semua langkah ini bukan tanpa tantangan. Perubahan iklim mengganggu pola tanam, menurunkan produktivitas, dan memunculkan risiko gagal panen. Urbanisasi menyempitkan lahan, memicu alih fungsi, dan mengurangi regenerasi petani muda. Ketergantungan pada impor pangan membuat stabilitas harga domestik rentan terhadap dinamika global. Namun di tengah kompleksitas tersebut, komitmen untuk terus maju tetap terjaga.

Apa yang telah dilakukan sejauh ini bukanlah akhir dari pekerjaan. Ia merupakan fondasi awal menuju transformasi pertanian yang lebih dalam. Masih dibutuhkan kesinambungan kebijakan lintas waktu, koordinasi antar sektor yang lebih solid, serta pembiayaan yang cukup untuk mendukung seluruh rantai nilai pangan—dari hulu hingga hilir. Pembangunan pertanian bukan sekadar urusan produksi, tetapi juga keberlanjutan ekosistem, kesejahteraan petani, dan kesadaran konsumen.

Dalam jangka menengah, swasembada bukan berarti semua harus diproduksi sendiri. Dunia telah bergerak menuju keterhubungan

global yang saling tergantung. Namun dalam urusan pangan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai—kita tidak boleh terus menerus berada pada posisi rawan. Swasembada artinya memiliki kontrol. Kita boleh memilih untuk membeli dari luar, tetapi bukan karena tidak mampu menghasilkan sendiri.

Perjalanan menuju kedaulatan pangan harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer. Namun hari ini, kita telah melihat tanda-tanda bahwa mimpi itu mulai membumi. Produksi pangan strategis mulai menunjukkan tren positif. Lahan-lahan baru mulai aktif ditanami. Teknologi mulai menjadi bagian dari kebiasaan baru petani. Anak muda mulai melihat sektor pertanian sebagai ruang masa depan. Inilah benih-benih kedaulatan yang sedang kita semai bersama.

Penutup ini bukan akhir dari cerita, tetapi undangan untuk melanjutkan perjalanan. Kementerian Pertanian bersama seluruh pemangku kepentingan, telah dan akan terus bekerja untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang telah ditempuh tidak terhenti di tengah jalan. Bahwa swasembada pangan bukan sekadar warisan narasi masa lalu, tetapi proyek kolektif menuju masa depan Indonesia yang mandiri, tangguh, dan bermartabat.

Setiap bulir padi yang tumbuh dari tanah sendiri adalah simbol harapan. Setiap petani yang sejahtera adalah cermin keberhasilan pembangunan. Setiap rumah tangga yang mengonsumsi produk lokal adalah bagian dari gerakan besar menuju kedaulatan. Maka biarlah kita terus bekerja, dengan kesadaran penuh bahwa

swasembada pangan bukanlah mimpi, melainkan tugas bersama yang bisa dan harus diwujudkan—secara bertahap, nyata, dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian, bersama dengan seluruh pihak terkait, telah merumuskan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mencapai swasembada pangan. Namun, pencapaian swasembada pangan tidaklah mudah dan memerlukan komitmen jangka panjang dan kerja sama antar pihak. Transformasi sektor pertanian menuju modernisasi membutuhkan investasi yang cukup besar, baik dari segi infrastruktur, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Pemerintah harus terus mendorong kolaborasi antara berbagai sektor untuk menciptakan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan petani. Di sisi lain, masyarakat juga harus lebih sadar akan pentingnya mengonsumsi produk pangan lokal yang berkualitas serta mendukung gerakan swasembada pangan nasional.

Menghadapi dinamika global dan perubahan struktural di dalam negeri, kebijakan pangan nasional harus semakin fleksibel dan responsif. Iklim yang makin tidak menentu, urbanisasi yang mempersempit lahan pertanian, serta persaingan global dalam perdagangan komoditas menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Di sinilah peran riset dan inovasi sangat vital, untuk menyediakan rekomendasi teknis dan kebijakan yang tepat dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan efektif.

Akhirnya, swasembada pangan adalah tanggung jawab bersama. Setiap langkah yang diambil hari ini akan menentukan masa depan pangan Indonesia. Oleh karena itu, kita semua harus memiliki komitmen yang kuat, bekerja secara profesional, dan terus berinovasi demi terwujudnya kedaulatan pangan yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia.

Kesadaran untuk mengonsumsi produk lokal, menghargai kerja petani, dan mendukung kebijakan pangan nasional harus menjadi bagian dari budaya bangsa. Setiap langkah menuju swasembada hari ini akan membentuk fondasi kemandirian pangan Indonesia di masa depan—sebuah masa depan yang bergantung pada keberanian kita untuk bertransformasi, berkolaborasi, dan berinovasi demi mewujudkan kedaulatan pangan yang sejati.

"Swasembada pangan bukan sekedar target program atau jargon pembangunan. Ia adalah gambaran ideal tentang suatu bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya..."

DAFTAR BACAAN

- Akbar, R.J., Aprilia Ika. (2023). Mentan Amran: Sudah Ada Hilal RI Stop Impor Jagung. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.viva.co.id/bisnis/1684968-mentan-amran-sudah-ada-hilal-ri-stop-impor-jagung>
- Aprilia, R. (2024). Mentan Optimis Indonesia Mampu Capai Swasembada dalam 3 Tahun Kedepan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.beritasatu.com/network/gemapos/241189/mentan-optimis-indonesia-mampu-capai-swasembada-dalam-3-tahun-kedepan>
- Ardianto, P. (2024). Mentan Ajak Masyarakat Adat Gotong Royong Wujudkan Swasembada Pangan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://investor.id/business/381273/mentan-ajak-masyarakat-adat-gotong-royong-wujudkan-swasembada-pangan>
- Armanda, G. (2023). Mentan-Panglima TNI Teken MoU Kembalikan Swasembada Pangan dan Optimasi Lahan Tidur. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s54xwc423/mentanpanglima-tni-teken-mou-kembalikan-swasembada-pangan-dan-optimasi-lahan-tidur>
- Bata, F.D., Lida Puspaningtyas. (2024). Kementan Kolaborasi dengan Kemen PU dan TNI, Penguatan Irigasi Pada Lahan 2,3 Juta Hektare. Diakses pada 01 Mei 2025, dari

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/so0x56502/kementan-kolaborasi-dengan-kemen-pu-dan-tni-penguatan-irigasi-pada-lahan-23-juta-hektare>

BPS. (2025). "Berita Resmi Statistik 2025". Diakses pada tanggal 06 Mei 2025 dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2431>

Catriana, E., Anisa Aulia. (2024). Indonesia Miliki 10 Juta Hektare Lahan Potensial, Mentan Amran Optimistis Swasembada Pangan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari https://money.kompas.com/read/2023/11/03/091000826/indonesia-miliki-10-juta-hektare-lahan-potensial-mentan-amran-optimistis?lgn_method=google&google_btn=onetap

Chadie, Chadie. (2023). Kunker Mentan Andi Amran di Sulsel, Serukan Swasembada Pangan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/639762/kunker-mentan-andi-amran-di-sulsel-serukan-swasembada-pangan>

CNN Indonesia. (2025). Jepang Darurat Beras, Harga Menggila Jadi Nyaris Rp400 Ribu per 5 Kg. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250214183716-113-1198467/jepang-darurat-beras-harga-menggila-jadi-nyaris-rp400-ribu-per-5-kg>

Dyah, E. (2024). Jokowi Raih Penghargaan FAO, Jejak Sukses 10 Tahun Pembangunan Pertanian. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7517380/jokowi-raih-penghargaan-fao-jejak-sukses-10-tahun-pembangunan-pertanian?page=2>

- Fachri, Fachri. (2024). Kementan Gencarkan Program Cetak Sawah, Peneliti Padi Universitas Arkansas: Langkah Rasional!. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5706993/kementan-gencarkan-program-cetak-sawah-peneliti-padi-universitas-arkansas-langkah-rasional?page=2>
- Fuady, A. (2025). Kejar Swasembada Pangan, Provinsi NTT Targetkan 188.000 Hektare Lahan di 2025. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://kabarika.id/berita/2025/02/05/kejar-swasembada-pangan-provinsi-ntt-targetkan-188-000-hektaree-lahan-di-2025/>
- Hariato, M. (2024). Kementan percepat swasembada pangan lewat cetak sawah-Oplah. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita/4487901/kementan-percepat-swasembada-pangan-lewat-cetak-sawah-oplah>
- Hariato, M (2025). Mentan dan Kapolri diskusi untuk wujudkan swasembada jagung. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita/4579142/mentan-dan-kapolri-diskusi-untuk-wujudkan-swasembada-jagung>
- Hariato, M. (2025). Mentan siap wujudkan NTT sebagai lumbung pangan bagian timur Indonesia. Diakses pada 01 Mei 2025, dari https://www.antaranews.com/berita/4608094/mentan-siap-wujudkan-ntt-sebagai-lumbung-pangan-bagian-timur-indonesia#google_vignette
- Hariato, M. (2025). Mentan ajak kepala daerah peserta Retreat Magelang wujudkan swasembada. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita/4673121/mentan-ajak->

kepala-daerah-peserta-retreat-magelang-wujudkan-swasembada

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313402/inpres-no-2-tahun-2025>.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314647/inpres-no-3-tahun-2025>.

Karyadi, N. (2024). Jokowi menerima Agricola Medal dari FAO, Mentan Amran Sulaiman: Presiden ucapkan terima kasih kepada petani di seluruh Indonesia. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://elshint.com/news/346478/2024/08/30/jokowi-menerima-agricola-medal-dari-fao-mentan-amran-sulaiman-presiden-ucapkan-terima-kasih-kepada-petani-di-seluruh-indonesia>

Klopak Indonesia. (2024). Di Hari Sumpah Pemuda, Mentan Amran Beberkan 4 Pesan Wujudkan Swasembada Pangan Secara Terhormat. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://klopakindonesia.com/di-hari-sumpah-pemuda-mentan-amran-beberkan-4-pesan-wujudkan-swasembada-pangan-secara-terhormat/>

Kufung, M. (2024). Mentan Amran Optimis Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.jalurinfosulbar.id/regional/97911928723/mentan->

amran-optimis-indonesia-menjadi-lumbung-pangan-dunia?page=2

Mulyana, C. (2024). PBB: Krisis Iklim dan Pangan Picu Kelaparan serta Kerusuhan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://mediaindonesia.com/internasional/651478/pbb-krisis-iklim-dan-pangan-picu-kelaparan-serta-kerusuhan>

Mustofa, A. (2024). Mentan Amran Sulaiman Ingin Pulau Madura Jadi Kekuatan Swasembada Pangan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5595927/mentan-amran-sulaiman-ingin-pulau-madura-jadi-kekuatan-swasembada-pangan>

Muzakki, M.R. (2024). Kementan dan Kemendikti Kerja Sama Wujudkan Swasembada Pangan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/kementan-dan-kemendikti-kerja-sama-wujudkan-swasembada-pangan-1161254>

Nikson, Nikson. (2024). Pastikan Ketersediaan Air, Mentan Amran Kolaborasi Program Swasembada Pangan Bersama KemenPU. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://bisnisjakarta.id/nasional/pastikan-ketersediaan-air-mentan-amran-kolaborasi-program-swasembada-pangan-bersama-kemenpu/>

Palopopos Redaksi, (2025). Kementan Tegaskan Komitmen Swasembada Pangan, Bulog Siap Serap 3 Juta Ton Beras Petani. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://palopopos.fajar.co.id/2025/01/30/kementan-tegaskan-komitmen-swasembada-pangan-bulog-siap-serap-3-juta-ton->

beras-petani/

Pangannews.id. (2024). Kolaborasi Kementan dan Kemdiktisaintek Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://pangannews.id/berita/1740403394/kolaborasi-kementan-dan-kemdiktisaintek-wujudkan-swasembada-pangan-nasional-berkelanjutan>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>.

Prakosa, G. (2023). Buat Pondasi Lebih Kuat, Mentan Amran Optimis Indonesia Bisa Swasembada. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.jalurinfosulbar.id/regional/97911928723/mentan-amran-optimis-indonesia-menjadi-lambung-pangan-dunia?page=2>

Prakosa, G. (2024). Sehari Empat Provinsi, Demi Swasembada Mentan Amran Hanya Istirahat di Heli dan Pesawat. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.harianmassa.id/ekbis/2714187414/sehari-empat-provinsi-demi-swasembada-mentan-amran-hanya-istirahat-di-heli-dan-pesawat?page=2>

Purnama, B.E. (2024). Mentan Amran Gelar Rapat Maraton di Hari Minggu, Ingin Lompatan Besar Menuju Swasembada Pangan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/716749/mentan-amran->

gelar-rapat-maraton-di-hari-minggu-inginkan-lompatan-besar-menuju-swasembada-pangan

Putri, I,R,R (2025). Kementan Gaet Densus 88, Bina Napi Terorisme buat Sukseskan Swasembada. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7715748/kementan-gaet-densus-88-bina-napi-terorisme-buat-sukseskan-swasembada>

Risfil, A. (2024). Pemerintah Kebut Program Swasembada Pangan di Merauke. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.rri.co.id/nasional/1094785/pemerintah-kebut-program-swasembada-pangan-di-merauke>

Rizal, Rizal. (2024). Mentan Amran ajak Kepala Desa Seluruh Indonesia Berkolaborasi Wujudkan Swasembada Pangan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.beritasatu.com/network/beritasusl/356298/mentan-amran-ajak-kepala-desa-seluruh-indonesia-berkolaborasi-wujudkan-swasembada-pangan>

Rizal, Rizal. (2024). Sinergi Kementan-Kementrans Bangun Kawasan Pertanian untuk Swasembada Pangan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.beritasatu.com/network/beritasusl/397444/sinergi-kementan-kementrans-bangun-kawasan-pertanian-untuk-swasembada-pangan>

Sandy, F. (2025). Hore! Kantor Amran Beri Kabar Mantap, RI Bentar Lagi Swasembada Pangan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250324170351-4->

621317/hore-kantor-amran-beri-kabar-mantap-ri-bentar-lagi-
swasembada-pangan

Sitorus, R.J.S. (2017). *Perencanaan Penggunaan Lahan*. Bogor: PT Penerbit IPB Press

Surry, K. (2024). Panen dan tanam jagung di Aceh, Mentan: Hilal tanda stop impor. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://aceh.antaranews.com/berita/353451/panen-dan-tanam-jagung-di-aceh-mentan-hilal-tanda-stop-impor>

Tanjung, W.J. (2025). Mentan Targetkan Sumsel Jadi Daerah Penghasil Beras Terbesar. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-7806564/mentan-targetkan-sumsel-jadi-daerah-penghasil-beras-terbesar>

Tantomi, I. (2024). Mentan Amran Sebut Keuntungan dan Teknologi Jadi Kunci Utama Bagi Generasi Muda Bertani Lewat Brigade Pangan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.liputan6.com/news/read/5800364/mentan-amran-sebut-keuntungan-dan-teknologi-jadi-kunci-utama-bagi-generasi-muda-bertani-lewat-brigade-pangan>

Trinoviana, A. (2024). Mentan Amran Paparkan Konsep Swasembada Pangan di Retreat Kabinet Merah Putih. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.inews.id/finance/makro/mentan-amran-paparkan-konsep-swasembada-pangan-di-retreat-kabinet-merah-putih/2>

Trinoviana, A. (2024). Demi Swasembada Pangan, Mentan Amran Jelajahi 3 Provinsi dalam 1 Hari. Diakses pada 01 Mei 2025, dari

<https://www.inews.id/finance/makro/demi-swasembada-pangan-mentan-amran-jelajahi-3-provinsi-dalam-1-hari>

Tuter, A., Haidar Ilyas (2024). Kementan dan BUMN Bahas Target Swasembada Pangan. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://www.rri.co.id/bisnis/1064542/kementan-dan-bumn-bahas-target-swasembada-pangan>

Visi, Misi dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://mmc.tirto.id/documents/2023/10/26/1276-visi-misi-indonesia-maju-2024-final.pdf?x=2676>

Zuhdi, N. (2024). Mentan Amran Sulaiman Gelorakan Swasembada Pangan di HUT ke-79 RI. Diakses pada 01 Mei 2025, dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/693486/mentan-amran-sulaiman-gelorakan-swasembada-pangan-di-hut-ke-79-ri>

BIOGRAFI PENULIS



Andi Amran Sulaiman adalah sosok yang dikenal luas sebagai figur inspiratif dalam dunia pertanian Indonesia. Lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968, ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerja keras dan pengabdian. Ayahnya, Andi B. Sulaiman Dahlan Petta Linta, adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan, sementara ibunya, Andi Nurhadi Petta Bau, merupakan sosok ibu tangguh yang mendampingi perjalanan hidup keluarga besar mereka yang terdiri dari dua belas bersaudara. Kecintaannya pada dunia pertanian membawanya menempuh studi lebih lanjut hingga akhirnya menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar.

Perjalanan hidup Amran mencerminkan kerja keras dan komitmen pada kemajuan bangsa. Selain sebagai akademisi, ia juga dikenal sebagai pengusaha yang sukses, namun tetap membumi dan berorientasi pada pengabdian. Keahliannya di bidang pertanian dan kepeduliannya terhadap nasib petani Indonesia menjadikannya sosok yang layak dipercaya untuk memimpin Kementerian Pertanian. Amran pertama kali diangkat sebagai Menteri Pertanian pada tahun 2014 dan menjabat hingga 2019. Setelah beberapa waktu, ia kembali dipercaya untuk mengemban tugas yang sama sejak 25 Oktober 2023. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Amran kembali masuk dalam Kabinet Merah Putih, menjadikan dirinya sebagai salah satu

menteri pertanian yang menjabat selama tiga periode. Komitmen, integritas, dan kerja nyatanya dalam membangun sektor pertanian nasional menjadikan Andi Amran Sulaiman bukan hanya birokrat, tapi juga pejuang pangan yang tak pernah lelah berinovasi demi kedaulatan pangan Indonesia.

Setelah menyelesaikan studi dasarnya, Amran belajar ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin Makassar, dimulai pada tahun 1988 dan memperoleh gelar sarjana pada tahun 1993. Ia melanjutkan untuk memperoleh gelar master dan pascasarjana dari universitas yang sama masing-masing pada tahun 2003 dan 2012, semuanya pada subjek yang sama. Ia lulus dengan IPK maksimal, dan mematenkan berbagai penemuan yang mencakup pengendalian hama. Saat ini ia memegang 5 hak paten, selain tercatat sebagai dosen di Universitas Hasanuddin.

Setelah lulus, Andi Amran Sulaiman bekerja di PT Perkebunan Nusantara XIV. Ia memulai kariernya sebagai kepala operasi lapangan di sebuah pabrik gula pada tahun 1994, dan dipromosikan sebanyak 4 kali selama enam tahun pertamanya di perusahaan tersebut, dengan puncaknya sebagai kepala logistik. Dia mengundurkan diri setelah 15 tahun. Kemudian, ia mendirikan bisnisnya sendiri, dimulai dengan patennya atas racun tikus (bernama "Tiran" sebagai akronim dari Tikus diracun Amran) dan berkembang pesat, mencakup 10 perusahaan dengan pendapatan tahunan gabungan mendekati US\$1 miliar pada tahun 2014. Ia menerima penghargaan sipil Satyalancana Pembangunan dari Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007.

Zainul Azmi lahir di Jambi 18 Februari 1986. Ayah dari dua anak ini merupakan lulusan S1 Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, IPB Tahun 2008. Pada Tahun 2009 ia diterima sebagai PNS di Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2021 ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya ke Program S2 *Double Degree* Ilmu Ekonomi UI dan *Development Economics Kobe University*, Jepang, hingga lulus pada tahun 2014. Pengalaman training yang pernah ia ikuti diantaranya *Training on Agricultural Policy di Tokyo* pada tahun 2010. Sejak awal tahun 2015, ia dipercaya sebagai Pj Kepala Subbagian Perencanaan Wilayah Biro Perencanaan. Pada tahun 2019 ia mendapatkan beasiswa dari NZAID untuk melanjutkan studi S3 di *Lincoln University New Zealand (Faculty of Agribusiness and Commerce)* hingga mendapat gelar *Ph.D in Agricultural Economics*. Sejak tahun 2023 dipercaya sebagai Ketua Kelompok Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan.

Akbar Choer lahir di Jakarta 26 Maret 1981. Ayah dari dua anak ini merupakan lulusan S1 Sosial Ekonomi Industri Peternakan (SEIP), IPB Tahun 2005. Pada Tahun 2011 ia diterima sebagai PNS di Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian. Pada tahun 2019 ia melanjutkan studi ke Program S2 Manajemen Lingkungan Universitas Pakuan di Kota Bogor melalui proses ijin belajar, hingga lulus pada tahun 2022. Pada bulan Oktober hingga November tahun 2020 mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Muda selama 240 jam pelatihan yang diselenggarakan oleh Program Magister Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran

bekerjasama dengan Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas. Sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang, dipercaya sebagai Ketua Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) III, pada Kelompok Substansi Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan, Biro Perencanaan.